

Strategi Mengelola Dampak COVID-19 di Berbagai Sektor



Sunardi, Ilham Abu, Muhammad Sultan

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

STRATEGI MENGELOLA DAMPAK COVID-19 DI BERBAGAI SEKTOR

Sunardi, Ilham Abu, Muhammad Sultan



STRATEGI MENGELOLA DAMPAK COVID-19 DI BERBAGAI SEKTOR

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-6384-36-7

14,8 x 21 cm

132 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Sunardi,

Ilham Abu,

Muhammad Sultan

Desain Cover

Azizurrahman

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, masyarakat lebih banyak melakukan sejumlah aktivitas produktif di rumahnya masing-masing. Tidak terkecuali para penulis, selain melaksanakan rutinitas sebagai seorang dosen, juga tetap produktif dalam menulis buku.

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang senantiasa dan tiada hentinya memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya sehingga buku ini telah selesai disusun.

Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang mendukung sehingga buku ini telah berhasil diselesaikan. Khususnya, terima kasih kami haturkan kepada pimpinan Universitas Mulawarman Samarinda, tempat kami mengabdikan diri sebagai dosen yang senantiasa memberikan dukungan secara moril dan materil kepada para dosen untuk tetap mengembangkan diri dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kami meyakini bahwa buku ini akan memberikan manfaat bagi pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi seperti guru, dosen, pengusaha, konsultan, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum. Kami akan mengulas berbagai strategi mengelola dampak adanya Covid-19 di Indonesia.

Kemungkinan kekurangan masih ditemui dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman agar lebih menyempurnakan penyusunan buku ini pada masa yang akan datang.

Samarinda, 9 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	vi
Pendahuluan.....	1
Mendorong Keberhasilan Vaksinasi Covid-19	3
Menakar Peluang Memperlambat Laju Covid-19 di Bulan Puasa	8
Pencegahan Penyebaran Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Gerakan Pak RT SI LAJU CAKAP	11
Kartini Menang Melawan Covid-19?.....	15
Ujian Sosial Covid-19	19
Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19	22
Royalti Musik di Tengah Pandemi Covid-19	25
Apakah Vaksinasi Covid-19 di Pedesaan Gagal?	28
Generasi Milenial (Tidak) Tanggap Covid-19.....	31
Apakah Indonesia Siap Jika Covid-19 Berlangsung Permanen?	36
Rumah Belajar Covid-19; Solusi Belajar Anak di Masa Pandemi.....	41
Apakah Larangan Mudik Lebaran Sia-Sia?	44
Ternyata, Usaha Ini Mampu Bertahan di Masa Pandemi.....	48
Silaturahmi Online, Mengapa Mesti Alergi?.....	51
Kapan Rampungnya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia?.....	55
Merencanakan Lebaran yang Lebih Baik Tanpa Harus Mudik	58
Langkah Mempercepat Vaksinasi Covid-19 di Indonesia.....	61

Apakah Mudik Lebaran Sudah Diperbolehkan Tahun Depan?	64
Indonesia Bisa Mengambil Hikmah di Balik Kasus Covid-19 di India.....	66
Pentingnya Menanamkan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pada Anak Sejak Dini.....	69
Donor Darah di Masa Pandemi	72
Menakar Keampuhan Sikap AIO Masyarakat dalam Mengendalikan Covid-19	75
Pentingnya Pembentukan Unit Layanan Khusus Narkoba dan HIV/AIDS di Perguruan Tinggi.....	78
Relawan Sampah “Bukan” Sampah	81
Memaksimalkan Penerimaan Pajak di Pelosok Desa.....	85
Ingin Memiliki Kendaraan? Sediakan Dulu Lahan Parkir	89
Menggagas Solusi Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja Siswa	92
Duka Nanggala 402 dan Kebangkitan Pertahanan	102
Menjadi Guru “Mesin Huruf Vokal”	105
Membangkitkan Semangat Peduli Pendidikan Anak Melalui Youtube	109
Bagaimana BSI Menggaet Para Calon Nasabah?	112
Bagaimana Menyelamatkan Generasi Muda dari Kecelakaan Lalu Lintas?	115
Apakah Kampus Mengajar Salah Satu Solusi Memajukan Pendidikan Indonesia?	118
Daftar Pustaka	122
Biodata Penulis	124

PENDAHULUAN

Covid-19 telah berlangsung setahun lebih di Indonesia, namun hingga saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kepastian kapan berhenti dan hilang dari tanah air.

Kemunculan Covid-19 di Indonesia membawa dampak yang begitu luas pada semua sektor kehidupan, baik di sektor perekonomian, sosial budaya, dan pendidikan maupun sektor kehidupan lainnya. Tidak sedikit sektor usaha mengalami kerugian dan kebangkrutan yang berakhir pada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Interaksi sosial antar masyarakat pun ikut terdampak karena adanya Covid-19. Tidak jarang warga yang menderita Covid-19 mendapatkan perlakuan diskriminatif dan stigma di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, nilai-nilai gotong royong dan saling tolong-menolong di antara masyarakat Indonesia yang telah dikenal sejak lama oleh negara lain di dunia, pun turut terdampak karena adanya Covid-19.

Dunia pendidikan juga tidak luput dari dampak adanya Covid-19. Satuan pendidikan di berbagai daerah lebih banyak dilakukan dalam jaringan (daring). Masih sangat terbatas satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di ruangan kelas. Akibatnya, interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, tidak terjalin secara langsung. Bahkan, masih banyak di antara siswa yang belum saling mengenal sejak aktif terdaftar menjadi siswa di satuan pendidikan tertentu.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dan secara konsisten menerapkan berbagai strategi dalam mengendalikan Covid-19. Mulai dari imbauan penerapan protokol kesehatan, kebijakan pembatasan aktivitas dan bepergian hingga program vaksinasi. Imbauan dan kebijakan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Pada buku ini, penulis akan mengulas strategi mengelola dampak selama berlangsungnya Covid-19 di Indonesia. Selain itu, penulis juga

akan menyajikan beberapa isu sosial lainnya yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat baik sebelum maupun pasca pandemi Covid-19.

MENDORONG KEBERHASILAN VAKSINASI COVID-19

Prediksi berakhirnya pandemi COVID-19 masih menyisakan tanda tanya, WHO pun belum mampu memastikan kapan pandemi ini berakhir. Berbagai riset dan pakar memprediksi berakhirnya COVID-19 di Indonesia kira-kira pertengahan atau pengujung 2021. Tetapi, tidak satu pun yang mampu memastikan kapan pandemi COVID-19 berhasil dihentikan. Ketidakpastian ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak yang tak kunjung ada habisnya.

Program vaksinasi diyakini sebagai salah satu harapan global dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Bukan tanpa alasan dan dasar ilmiah memosisikan vaksinasi sebagai alternatif pengendalian COVID-19. Kehadiran vaksin dengan berbagai merek dan tingkat efikasinya adalah upaya perlindungan dari ancaman pandemi COVID-19 demi tercapainya kekebalan komunitas (*herd immunity*).

Keberhasilan 100 % vaksin dalam mengendalikan COVID-19 tidak secara otomatis, mengingat tingkat efikasi dari masing-masing jenis vaksin belum ada yang mencapai angka tersebut. Pencapaian kekebalan komunitas melalui program vaksinasi masih harus disertai penerapan protokol kesehatan sesuai imbauan WHO dan pemerintah yaitu menjaga jarak aman, membiasakan cuci tangan, dan memakai masker.

Program vaksinasi menjadi angin segar dalam mengendalikan COVID-19, tetapi hingga hari ini masih menjadi pro-kontra bagi sebagian kalangan masyarakat. Padahal, program vaksinasi ini telah dimulai sejak 13 Januari dengan vaksinasi pertama Presiden Joko Widodo, dan pelaksanaannya pun tidak secara tiba-tiba karena didahului persetujuan Badan POM dan dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Celakanya, banyak dari kalangan yang kontra vaksinasi melancarkan aksi tolak vaksin dan tidak sedikit orang yang mengikutinya. Lantas, apakah target populasi 70% akan tercapai jika hal ini terus bergulir? Rupanya pemerintah tidak tinggal diam, dibuktikan program vaksinasi ini tetap berjalan hingga kini meskipun mendapat tantangan dari masyarakatnya sendiri. Pemerintah hadir dan terdepan dalam mensukseskan program ini melalui pembiayaan fantastis sehingga warga negara dapat mengikuti program vaksinasi secara gratis.

Hambatan program vaksinasi tidak hanya dari kalangan masyarakat kontra vaksin, tetapi juga keterbatasan stok vaksin. Sekali lagi bahwa pemerintah tetap tidak patah semangat, meski dalam pelaksanaannya dilakukan sasaran prioritas program vaksinasi yang dimulai petugas kesehatan lalu diikuti lansia dan petugas pelayanan publik. Pemberian vaksin pada sasaran prioritas hingga kini masih tetap berlangsung, dan pemerintah menggencarkan sosialisasi disertai keseriusan pemenuhan stok vaksin sesuai kebutuhan.

Sejumlah daerah di Indonesia pun turut aktif dalam mensukseskan program vaksinasi. Ditandai dengan pelaksanaan pemberian vaksin kepada kelompok sasaran prioritas tahap kedua. Tetapi, penolakan program vaksinasi COVID-19 masih saja ditemukan. Sebagai contoh, sebuah kelurahan di Kota Samarinda menjadwalkan program vaksinasi bagi staf kelurahan dan kader posyandu, namun sasaran yang hadir jauh dari target. Ketua RT masih ada yang menolak divaksin dengan berbagai alasan. Kader posyandu pun hanya terlihat beberapa orang saja. Sangat disayangkan. Padahal Ketua RT dan kader ini diharapkan dapat berperan sebagai tenaga edukator di lingkungannya.



Gambar 1. Salah seorang penulis menerima vaksinasi

Tidak mengherankan jika keikutsertaan warga dalam program vaksinasi kurang maksimal. Tidak perlu kaget. Tokoh masyarakat yang diharapkan hadir sebagai panutan justru tidak memberikan contoh positif di lingkungannya. Permasalahan ini tidak dapat dinilai sepele karena dapat mempengaruhi waktu pencapaian kekebalan komunitas.

Berbagai pertanyaan hadir karena fenomena tersebut, antara lain apakah gencarnya sosialisasi selama ini tidak berhasil menjangkau mereka? Apakah penolakan karena status kehalalan vaksin atau alasan lain? Apa pengaruhnya terhadap penerimaan program vaksinasi oleh warga di lingkungan mereka? Pendekatan seperti apa yang harus dilakukan kepada mereka agar bersedia mengikuti dan menjadi panutan di wilayahnya?

Penolakan yang ditunjukkan oleh mereka mempengaruhi warga di sekitarnya. Terbukti, banyak warga yang menolak mengikuti program vaksinasi karena Ketua RT-nya juga menolak divaksin. Dapat dibayangkan jika hal ini terjadi di daerah lain di Indonesia.

Program vaksinasi COVID-19 tidak akan mencapai jumlah sasaran maksimal jika tidak didukung seluruh elemen masyarakat. Tidak cukup

hanya dengan imbauan pemerintah disertai sosialisasi seperti yang digalakkan selama ini. Diperlukan sinergi dan kekompakan secara sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan partisipasi langsung seperti kesediaan Ketua RT dan kader posyandu menerima vaksinasi. Sekiranya hal ini tidak diindahkan oleh mereka, diperlukan strategi lain untuk menyempurnakan kegiatan sebelumnya.

Pembatasan kegiatan posyandu karena banyaknya kader posyandu yang tidak bersedia divaksin bukanlah sebuah solusi efektif karena dapat menimbulkan permasalahan baru. Pemantauan status gizi ibu dan balita tidak berjalan baik dan akhirnya dapat berujung munculnya masalah kesehatan masyarakat. Solusinya, kader posyandu yang menolak divaksin (padahal memenuhi syarat kesehatan pemberian vaksin), dapat dilakukan pergantian kader baru dengan syarat calon penggantinya telah mengikuti program vaksinasi COVID-19 selain persyaratan lainnya.

Begitu pula interaksi antara Ketua RT dengan warga dan sebaliknya, sementara waktu dilakukan tidak melalui tatap muka langsung, yaitu dengan memanfaatkan media teknologi dan informasi agar pelayanan publik tetap berjalan. Alternatif solusi lainnya adalah pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada Ketua RT yang menolak vaksin berupa pemberhentian insentif atau honor RT hingga waktunya mereka telah menerima vaksin. Selain itu, masyarakat yang bersedia divaksin dapat mengusulkan pemilihan ulang Ketua RT baru dengan syarat calon penggantinya telah mengikuti program vaksinasi dan memenuhi persyaratan lain.

Kesediaan tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan kader posyandu mengikuti program vaksinasi tidak menjamin bahwa semua warga di lingkungannya juga bersedia mengikuti program vaksinasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah dengan mempertimbangkan segala aspek agar tidak ada elemen masyarakat yang merasakan ketidakadilan akibat regulasi tersebut. Pada situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, dan mempertimbangkan asas manfaat serta demi terwujudnya kenormalan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehadiran negara dan segala kekuasaan yang melekat untuk membuat kebijakan khusus bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan.

Kebijakan tersebut bisa berupa pemberian penghargaan bagi warga yang telah menerima vaksinasi dapat memperoleh kesempatan bepergian

keluar-masuk daerah di Indonesia, kemudahan mengakses fasilitas umum dan layanan kesehatan jika mereka membutuhkan tanpa harus disertai test antigen dan swab, serta bentuk penghargaan lainnya. Sebaliknya, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi warga yang menolak mengikuti program vaksinasi COVID-19. Parameter penolakan vaksinasi dapat dinilai dari ketidakhadiran mereka pada saat jadwal pemberian vaksin padahal telah memenuhi persyaratan sebagai penerima vaksinasi COVID-19.

MENAKAR PELUANG MEMPERLAMBAT LAJU COVID-19 DI BULAN PUASA

Pada bagian 1 dalam buku ini telah diulas bahwa belum adanya kepastian kapan pandemi ini berakhir sehingga diperlukan kekompakan secara sungguh-sungguh seluruh komponen bangsa. Selain itu, dibutuhkan strategi mumpuni untuk memerangi dan menghentikan laju COVID-19 khususnya pada momentum bulan puasa.

Bulan puasa 2021 telah tiba (April-Mei 2021). Bagi umat muslim di seluruh dunia, momen bulan puasa diyakini sebagai bulan istimewa di antara 12 bulan dalam setahun. Banyaknya keistimewaan dalam bulan puasa sehingga tidaklah berlebihan jika setiap muslim berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Salah satu wujud nyata perilaku yang baik dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak aman saat berinteraksi langsung dengan orang lain, sesering mungkin membersihkan tangan, dan memakai masker saat berada di luar rumah.

Peluang melambatnya laju penyebaran COVID-19 saat bulan puasa bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Sejumlah sektor usaha melakukan pembatasan bahkan pengurangan jam kerja bagi karyawannya. Hal yang sama pun berlaku di instansi pemerintahan sehingga interaksi langsung yang biasa terjalin di sana, tetapi saat bulan puasa intensitasnya menjadi berkurang. Selain kepatuhan atas imbauan pemerintah tentang pembatasan kegiatan keagamaan di bulan puasa selama pandemi COVID-19, sebagian masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah selama puasa dan menggantikannya dengan memaksimalkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dukungan kuat dan sekaligus menjadi kekuatan besar dalam memerangi dan menghentikan laju COVID-19 selama bulan puasa juga telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yang membolehkan vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Tak ketinggalan sejumlah warung makan pun ikut serta membatasi aktivitas jual-beli dan bahkan menutup usahanya pada siang hari saat bulan puasa. Sejumlah peluang yang dinilai mampu memperlambat laju COVID-19 pada momen bulan puasa seharusnya dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin karena di baliknya terdapat pula banyak tantangan yang dapat menjadi penghalang keberhasilan dalam menghentikan laju COVID-19.

Tantangan-tantangan tersebut bahkan muncul bersamaan terciptanya peluang. Contohnya, saat diberlakukan kebijakan pembatasan dan bahkan pengurangan jam kerja selama bulan puasa di berbagai sektor swasta dan instansi pemerintah justru waktu tersebut dimanfaatkan untuk jalan-jalan dan berbelanja oleh sebagian karyawan dan pegawai. Diperlukan komitmen tinggi dan kebesaran hati para karyawan dan pegawai untuk mengindahkan kebijakan tersebut dan bukan sebaliknya.

Adanya pembatasan aktivitas keagamaan selama bulan puasa di tempat ibadah seperti mesjid dan musholla di banyak daerah di Indonesia juga tidak luput dari berbagai tantangan berupa sikap pembangkangan yang dipraktikkan kalangan masyarakat yang kurang setuju melaksanakan kegiatan beribadah di rumahnya karena menganggap bahwa bulan puasa hanya berlangsung selama sebulan dalam setahun. Permasalahan ini dapat dikelola dengan memaksimalkan peran pengurus mesjid sebagai relawan edukator COVID-19 misalnya mengimbau kepada warga sekitar untuk melaksanakan kegiatan penamatan bacaan Alquran di rumah masing-masing tanpa harus ke mesjid selain kegiatan ibadah lainnya.

Kehadiran MUI dengan fatwanya yang membolehkan vaksinasi COVID-19 saat berpuasa juga masih menyisakan persoalan karena tidak secara mutlak menjamin semua masyarakat muslim yang berpuasa akan mengindahkannya disebabkan minimnya informasi yang diperoleh mengenai fatwa MUI tersebut di samping faktor lainnya. Akibatnya, mereka akan tetap melancarkan aksi tolak vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Generasi milenial sebagai pengguna teknologi informasi

terbanyak saat ini dapat mengambil peran dalam menyampaikan informasi kebijakan pemerintah dan fatwa MUI tersebut kepada mereka.

Keikutsertaan pemilik warung makan pun dalam upaya memperlambat laju COVID-19 saat bulan puasa dengan menutup warungnya pada siang hari juga mendapatkan tantangan tersendiri. Terbukti, beberapa area tertentu di banyak daerah di Indonesia masih ditemukan lapak tempat berjualan makanan dan minuman yang ramai pengunjung menjelang waktu berbuka puasa. Praktik ini biasanya didominasi pelaku usaha kecil yang telah lama menantikan momentum puasa untuk menambah penghasilan keluarga terutama di masa pandemi. Perlukah kegiatan seperti ini dilarang? Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan protokol kesehatan COVID-19. Diperlukan kebijakan khusus menangani hal tersebut misalnya dengan mengatur jarak antar penjual dan memastikan kepatuhan protokol kesehatan. Langkah ini telah dipraktikkan pada sejumlah daerah. Pihak pemerintah daerah bersama instansi terkait harus melakukan pengawasan secara langsung di area tersebut.

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat kebiasaan klasik masyarakat saat memasuki hari-hari pengujung puasa berbondong-bondong mudik lebaran. Kondisi ini bukannya memperlambat laju penyebaran COVID-19 tetapi justru sebaliknya. Menanggapi permasalahan klasik tahunan ini, pemerintah telah menegaskan sejak dini bahwa larangan mudik lebaran tahun 2021 berlaku sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 (Kompas.com, 2021). Larangan mudik lebaran tahun ini seharusnya diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mempercepat Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19.

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 BERBASIS MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PAK RT SI LAJU CAKAP

Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang terjadi hampir di seluruh dunia sejak Desember 2019 dan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat. Timbulnya ketakutan dan bahkan kepanikan yang berlebihan dapat disebabkan berbagai hal antara lain peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dan kematian setiap harinya terus terjadi. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) hingga 12 Maret 2021 tercatat 118,058,503 kasus konfirmasi COVID-19 dan 2.621.046 kasus kematian di seluruh dunia. COVID-19 di Indonesia tercatat 1.410.134 kasus konfirmasi dan 38.229 kasus kematian. Semua pihak tentu berupaya dan berpartisipasi dalam melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak lagi terjadi penambahan jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ditindaklanjuti untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Secara teknis pelaksanaan PSBB di lapangan adalah membatasi aktivitas atau kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi penyebaran COVID-19 secara massif dan luas. Pembatasan kegiatan tersebut seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi kegiatan di tempat-tempat atau fasilitas umum, dan membatasi kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan masyarakat diikuti dengan adanya kebijakan pemerintah tentang bekerja dan belajar dari rumah (*Work and Study From Home*).

Akan tetapi, sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, masih ditemukan banyak warga yang beraktivitas seperti biasa dan kurang mengindahkan kebijakan yang ada dengan berbagai alasan. Misalnya saja masih ditemukan warga yang berkumpul pada satu tempat dengan jumlah relatif banyak, masih banyak warga yang tidak menggunakan masker pada saat keluar rumah, dan masih banyak lagi kebiasaan lainnya yang dinilai kurang mendukung dalam mencegah penyebaran COVID-19. Tentu hal tersebut tetap menjadi persoalan yang perlu dikaji dan ditemukan solusi alternatif atau pendekatannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta masyarakat setempat.

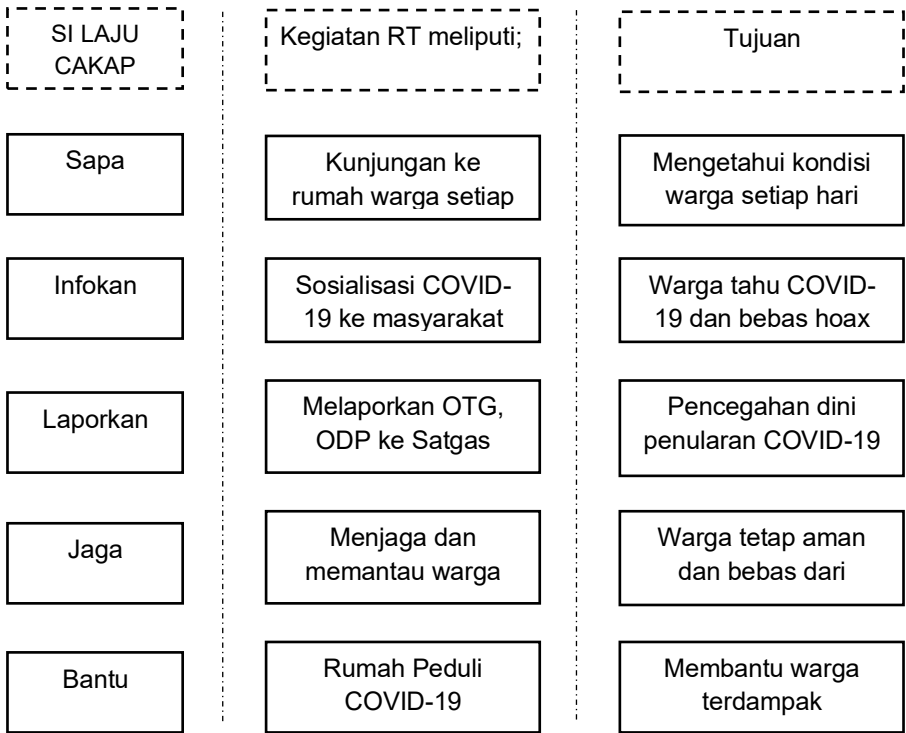
Berdasarkan hal tersebut, kami berpikir bahwa perlu ada upaya kongkrit yang harus dilakukan di level masyarakat. Bahwa ketua RT (Rukun Tetangga) yang dipilih oleh warga merupakan perpanjangan tangan, lidah, dan telinga dari pemerintahan desa/kelurahan atau struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan ketua RT di tiap-tiap wilayah merupakan sebuah kekuatan besar yang perlu diberdayakan dalam membantu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Diperlukan gerakan cepat, kreatif, dan partisipatif dari ketua RT dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di masyarakat. Gerakan ini kami sebut "Pak RT SI LAJU CAKAP", akronim dari Sapa, Infokan, Laporkan, Jaga, dan Bantu dengan Cepat, Kreatif, dan Partisipatif.

Adapun tujuan dari gerakan tersebut antara lain RT menyapa dan memantau secara langsung aktivitas masyarakat di lingkungannya, menginformasikan secara langsung dan tidak langsung tentang COVID-19 kepada warga termasuk mencegah penyebaran berita hoax, melaporkan warga setempat status ODP (orang dalam pemantauan) dan OTG (orang tanpa gejala) ke sarana kesehatan terdekat atau Satgas penanganan COVID-19, menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi aman, bersih, dan bebas dari kegiatan yang berpotensi penyebaran virus Corona, membantu warga yang merasakan dampak langsung dari pandemi COVID-19, dan melaksanakan semua kegiatan tersebut secara cepat, kreatif, dan partisipatif.

Gerakan tersebut dinilai dapat diimplementasikan di masyarakat bukan tanpa alasan. Sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh ketua RT

setempat antara lain keberadaan ketua RT biasanya dekat secara geografis dengan warga, memiliki pengetahuan cukup tentang kondisi lingkungan dan warganya, mudah menjangkau warga dan menjadi panutan di lingkungannya, memiliki kedekatan emosional dengan warga, memiliki *networking* yang baik antar ketua RT dan staf pemerintahan yang lebih tinggi, dan kemampuan komunikasi yang baik. Selain kekuatan yang dimiliki oleh ketua RT, juga terdapat berbagai peluang gerakan ini dapat diterapkan seperti ketua RT yang memiliki kegiatan atau pekerjaan, saat ini lebih banyak waktu di rumah sehingga banyak kesempatan berinteraksi dengan warga, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan, warga lebih banyak aktivitas di rumah sehingga mudah ditemui oleh ketua RT, solidaritas warga yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan sosial, luas wilayah dan jumlah warga yang ditangani ketua RT relatif terbatas, dan adanya dukungan dari forum atau organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat setempat.

Berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam gerakan ini antara lain sosialisasi COVID-19 kepada ketua RT dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak dan media sosialisasi lain. Selain itu, melaksanakan komponen kegiatan SI LAJU CAKAP dan pengadaan rumah peduli COVID-19. Kegiatan-kegiatan tersebut akan menghasilkan dampak positif antara lain meningkatnya pengetahuan dan peran ketua RT dalam mencegah COVID-19, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, dan membantu mengurangi beban warga yang mengalami dampak COVID-19. Secara sederhana gerakan Pak RT SI LAJU CAKAP dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Konsep Pak RT Si Laju Cakap

KARTINI MENANG MELAWAN COVID-19?

Apakah masih ada yang belum mengenal Raden Adjeng Kartini atau Raden Ayu Kartini atau RA Kartini? Sangat disayangkan jika masih ada yang tidak mengenalnya. Sejarah mencatat bahwa RA Kartini merupakan pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia atau dikenal tokoh emansipasi wanita Indonesia. Saat Indonesia belum merdeka, kemerdekaan perempuan juga masih terbatas dalam mengakses pendidikan. Hanya perempuan yang terlahir dari kaum bangsawan saja yang bisa mengakses suka cita pendidikan. Kartini tumbuh menjadi dewasa cerdas dan pemberani. Kecerdasan dan keberanian Kartini menjadikannya sosok perempuan yang disegani dan dihormati.

Kartini hadir terdepan dalam memperjuangkan nasib perempuan di tengah kemelut bangsa melalui pikiran, tenaga, dan waktunya. Kartini menilai bahwa telah terjadi diskriminasi hebat antara pria dan wanita dalam mengenyam pendidikan. Kartini tidak hanya menyoroti dengan pernyataannya tetapi dibuktikan langkah nyata dengan mendirikan sekolah, mengajar membaca dan menulis bagi kaum wanita sejak usia dini. Kartini bercita-cita mewujudkan perempuan Indonesia dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang. Perjuangannya tidak sia-sia. Jasanya yang amat besar bagi Indonesia sehingga Kartini ditetapkan menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Sebagai wujud penghargaan atas perjuangannya karena berhasil menyetarakan hak-hak kaum perempuan Indonesia di bidang pendidikan, masyarakat Indonesia selalu bersuka cita menyambut hari lahir perempuan hebat tanggal 21 April setiap tahunnya. Anak-anak hingga lansia biasanya larut dalam kebahagiaan pada setiap momen Hari Kartini. Berbagai kegiatan positif pun dihelat di seluruh pelosok tanah air seperti lomba dan festival. Tidak tanggung-tanggung di sejumlah daerah

biasanya berlangsung kegiatan beberapa hari dan puncak peringatannya 21 April. Apakah perayaan Hari Kartini di tengah pandemi Covid-19 tahun ini masih dapat disaksikan kemeriahannya?

Pemerintah Indonesia dan diikuti pemerintah daerah telah mengeluarkan himbauan dan sejumlah kebijakan pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk meminimalkan risiko penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran dan kesadaran warga untuk menahan diri menyambut Hari Kartini. Kegiatan meriah yang selama ini dipertontonkan, saatnya dikurangi atau bahkan ditiadakan dan diganti dengan bentuk partisipasi lainnya. Setiap momen peringatan Hari Kartini identik dengan perempuan. Lalu, bagaimana partisipasi perempuan di masa peperangan melawan Covid-19? Sudah saatnya perempuan Indonesia hadir terdepan dan berjuang penuh semangat layaknya Kartini memperjuangkan pendidikan di tengah sulitnya bangsa Indonesia saat itu.

Kartini dikenal sosok yang mudah menyatu dengan masyarakat, meskipun lahir dari keluarga bangsawan tetapi tidak menjaga jarak sosial dengan lingkungannya. Kartini dikenal sangat merakyat. Semangat Kartini yang demikian dapat diwujudkan di tengah pandemi Covid-19. Kaum perempuan dapat mendorong perempuan lain di lingkungannya untuk berperilaku mencegah penularan Covid-19. Perempuan dapat menjadi panutan dalam memerangi Covid-19 dan bersedia menjadi penerima vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Mengapa tidak? Kaum perempuan dewasa ini biasanya berkomunikasi langsung dan tidak langsung dalam berbagai kegiatan seperti acara pertemuan alumni dan arisan. Momentum ini dapat menjadi ruang dan waktu bagi kaum perempuan untuk melancarkan edukasi dan mempraktikkan perilaku pencegahan Covid-19.

Sikap kesederhanaan Kartini dapat dipraktikkan kaum perempuan saat pandemi Covid-19. Kaum perempuan seringkali menyelenggarakan kegiatan yang cenderung terlihat mewah, senang ramai, dan jauh dari kata sederhana. Situasi memerangi Covid-19 saat ini, kaum perempuan dapat menerapkan semangat kesederhanaan Kartini dengan mengurangi kegiatan yang tidak terlalu penting. Jika tetap mengadakan kegiatan yang dapat mengundang keramaian maka jumlahnya pun dibatasi dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Sosok Kartini yang selalu mengasahi dan menghormati sesama dapat diwujudkan dan ditingkatkan di masa pandemi Covid-19. Semangat mengasahi dan menghormati merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dapat dihadapi dengan sikap saling mengasahi dan menghormati. Contohnya, jika terdapat tetangga yang dinyatakan positif Covid-19 maka tetangga lainnya dapat memberikan dukungan moril dan bantuan materil. Menjauhkan stigma negatif dan diskriminasi kepada penderita Covid-19 beserta keluarganya. Itulah bentuk semangat Kartini dalam mengasahi dan menghormati sesama yang sesungguhnya di tengah pandemi.

Semangat Kartini lainnya yang dapat dipraktikkan di masa Covid-19 adalah keberaniannya. Berani mengatakan itu tidak benar jika mendengar berita *hoax* tentang Covid-19. Berani menjaga jarak saat bertemu orang lain. Berani mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar di lingkungannya. Berani menegur orang di dekatnya jika tidak memakai masker. Saat vaksinasi Covid-19, kaum perempuan berani terdepan dan pertama menerima vaksinasi.

Kartini tangguh juga diharapkan hadir pada kaum perempuan saat Covid-19. Tangguh di tengah kesulitan ekonomi keluarga. Tangguh dan sabar dalam mengajari anak di rumahnya saat pembelajaran *online*. Tangguh mencari penghasilan tambahan keluarganya saat suaminya di-PHK dari tempatnya bekerja. Tangguh untuk menunda mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan dan hiburan atau rekreasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Selain itu, kecerdasan Kartini berupa pemikiran revolusioner di bidang pendidikan tentu tidak diragukan lagi. Kecerdasan yang dimiliki kaum Kartini di tengah pandemi Covid-19 dapat diimplementasikan sebagai edukator Covid-19 dan vaksinasi di lingkungannya.

Lalu, bagaimana memunculkan semangat Kartini di tengah situasi peperangan melawan Covid-19? Banyak hal yang dapat dilakukan. Kaum perempuan perlu aktif mengikuti kegiatan edukasi seperti seminar atau sosialisasi Covid-19 dan vaksinasi baik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kaum perempuan juga sebaiknya memperbanyak literasi agar mampu menjadi edukator sejati di lingkungannya. Menambah wawasan dan membuka diri dalam menerima

informasi melalui *sharing* pengetahuan dan pengalaman dari sumber informasi yang terpercaya serta bentuk kegiatan lainnya.

Kehadiran Kartini masa kini menjadi sebuah harapan besar dalam memerangi dan menghentikan Covid-19 di tanah air. Berbekal semangat dan keseriusan Kartini masa kini tentunya menjadi peluang dan kekuatan tambahan dalam mensukseskan program vaksinasi sebagai salah satu upaya menghentikan ganasnya Covid-19 di Indonesia. Semangat Kartini baru jangan sampai hilang di tengah masa ketidakpastian Covid-19. Dukungan dan partisipasi semua komponen bangsa tidak dapat ditunda lagi karena Covid-19 belum dapat diprediksi pasti kapan berakhirnya.

UJIAN SOSIAL COVID-19

Sudah setahun lebih Covid-19 bertahan di Indonesia. Kasusnya telah mencapai angka jutaan penderita dan mengakibatkan korban meninggal dunia puluhan ribu orang. Angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap harinya dan masih belum menunjukkan tanda-tanda kapan Covid-19 menyerah dan hilang dari tanah air. Pemerintah sedang gencar melancarkan vaksinasi sebagai upaya pengendalian serangan Covid-19. Meskipun banyak penolakan vaksinasi dari warganya sendiri, akan tetapi sejak dimulainya hingga sekarang sudah mencapai 4 persen dari populasi yang berhasil divaksinasi.

Selain itu, antusias warga dengan sikap kepatuhannya menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker saat berada di luar rumah masih tetap konsisten dilaksanakan. Sejumlah strategi dan taktik telah dijalankan lengkap dengan amunisi pembiayaan dari pemerintah yang jumlahnya cukup fantastis, tetapi Covid-19 belum mampu ditaklukkan dan dihilangkan. Bahkan, masih ditemukan jumlah penderita baru dan korban meninggal dunia setiap harinya.

Seperti peperangan pada umumnya, Covid-19 pun mengakibatkan banyak kerugian. Contohnya, kondisi perekonomian yang tidak stabil sehingga mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya, terbatasnya mobilitas barang dan manusia dari dan ke suatu daerah, perubahan metode pembelajaran di satuan pendidikan yang dapat menghambat kelancaran pembelajaran hingga jatuhnya korban meninggal dunia yang tidak sedikit.

Merajalelanya Covid-19 di Indonesia hingga ke pelosok daerah juga mempengaruhi intensitas dan kualitas interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Bukan hanya disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan

pemerintah tentang PSBB semata, melainkan memudarnya budaya ramah, gotong royong, dan tolong menolong antara sesama di tengah pandemi Covid-19. Padahal, masyarakat Indonesia telah dikenal sejak lama oleh dunia dengan budaya tersebut terutama dalam situasi sulit seperti saat ini. Kehadiran Covid-19 seolah menjadi menjadi alat uji untuk mengukur kekuatan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia berhasil lulus ujian nilai-nilai sosial akibat hadirnya Covid-19? Tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Hal ini dapat dibuktikan, masih adanya warga yang tidak peduli dengan penderita Covid-19 di lingkungannya. Penderita Covid-19 yang isolasi mandiri di rumah sangat merasakan hilangnya nilai-nilai sosial di masyarakat saat dinyatakan positif Covid-19. Kejadian yang dialami penderita, sebelumnya telah diteliti oleh penulis. Hasilnya diperoleh informasi bahwa penderita Covid-19 merasa terasing di lingkungannya sendiri dan bahkan memilih meninggalkan rumahnya beberapa hari dibandingkan harus di jauhi oleh tetangga dan bahkan keluarganya sendiri.

Stigma dan diskriminasi yang dialami penderita Covid-19 terutama di awal pandemi melanda memang sangat meresahkan. Penyebab utamanya antara lain kurangnya pengetahuan dan persepsi negatif seseorang mengenai Covid-19. Belum lagi, berita bohong (hoaks) yang banyak berkembang dengan cepatnya di masyarakat. Menyebarnya informasi hoaks menjadi sumber ketakutan masyarakat tentang Covid-19. Anehnya, ketakutan yang dialami mampu mengalahkan nilai-nilai sosial yang selama ini dilestarikan. Nilai-nilai sosial di masyarakat menjadi hilang akibat Covid-19.

Fenomena sosial ini cukup meresahkan sehingga diperlukan langkah nyata untuk mengembalikan nilai-nilai sosial yang hilang akibat Covid-19. Kehadiran pemerintah beserta pihak terkait seperti petugas kesehatan dan Satgas Covid-19 di daerah sangat diharapkan kehadirannya di daerah tempat tinggal penderita. Selain untuk melakukan monitoring praktik pencegahan penyebaran Covid-19 juga memastikan pasokan kebutuhan pokok penderita terpenuhi.

Kehadiran tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat hadir memberikan dukungan moril kepada penderita Covid-19 dan mendorong warga sekitar rumah penderita agar tidak mendiskriminasi penderita dan

membangkitkan kembali semangat kebersamaan di tengah pandemi Covid-19. Pewarta, penggiat sosial media, dan generasi milenial perlu hadir menyampaikan informasi yang terpercaya melalui media untuk membantu menghilangkan ketakutan warga.

Nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia bahkan sebelum Covid-19 melanda tidak perlu diragukan. Terbukti, masyarakat Indonesia dengan semangat Pancasila selalu aktif membantu sesama saat terjadi musibah baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua komponen bangsa harus bahu-membahu untuk membangkitkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dan membuktikan lulus ujian sosial Covid-19 dengan nilai sempurna.

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA PANDEMI COVID-19

Tepatnya tanggal 30 Maret 2021, Pemerintah Indonesia melalui empat kementerian yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Meskipun Indonesia masih dalam suasana perang melawan Covid-19, akan tetapi terbitnya SKB ini membawa harapan baru dalam sistem pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.

Pemerintah telah memutuskan pembelajaran tatap muka (PTM) meski masih terbatas. Salah satu tujuan dilaksanakannya PTM adalah mencegah ketertinggalan pembelajaran (*lost of learning*) siswa di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Langkah pemerintah dalam memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan dinilai sudah tepat. Vaksinasi guru merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses PTM. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan vaksinasi guru telah rampung paling lambat bulan Juli 2021.

Tidak perlu menunggu capaian target vaksinasi guru bagi sekolah yang telah siap melaksanakan PTM. Sekolah yang menyatakan siap PTM harus didahului dengan rampungnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Sejak Januari 2021, sebanyak 22 persen satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas di sejumlah daerah. Pertanyaannya, apakah target vaksinasi guru dan tenaga kependidikan dapat dicapai di bulan Juli 2021? Pertanyaan ini penting dijawab karena masih 78 persen sekolah yang belum menerapkan PTM.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.708.096 orang yang tersebar di 217.270 sekolah. Masih tersisa waktu sekitar 100 hari untuk merampungkan vaksinasi guru. Setelah dikalkulasikan, diperoleh angka 27.080 guru yang harus divaksinasi per hari agar target dapat dicapai pada akhir Juli 2021. Bagaimana dengan kemampuan vaksinator setiap hari? Kementerian Kesehatan RI memiliki vaksinator dengan kemampuan vaksinasi 300 ribu dosis per harinya. Artinya, target 100 persen vaksinasi jika hanya sasaran guru setiap harinya pasti dicapai pada bulan Juli 2021 dan bahkan sebelumnya.

Sekadar mengingatkan kembali bahwa sejak Februari 2021 hingga sekarang, sasaran pemberian vaksinasi adalah petugas pelayanan publik dan lansia. Hal ini berarti sasaran pemberian vaksinasi oleh vaksinator bukan hanya guru, melainkan banyak petugas pelayanan publik lainnya dan juga lansia yang ikut divaksinasi setiap harinya. Hasil kalkulasi di atas dapat berubah setiap saat karena berbagai faktor antara lain jika ditemukan guru tidak bersedia divaksinasi padahal sudah memenuhi persyaratan vaksinasi.

Guru dan tenaga kependidikan yang tidak bersedia divaksinasi memiliki sejumlah alasan antara lain trauma jarum suntik, keraguan pada jenis vaksin tertentu, ketakutan dampak pasca vaksinasi, tidak memperoleh dukungan berupa izin keluarga, dan alasan lain. Padahal, vaksinator yang menyuntikkan jarum suntik steril merupakan tenaga kesehatan profesional sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi kemampuannya.

Banyak kabar bohong (*hoax*) di lingkungan masyarakat yang mengatakan bahwa jenis vaksinasi yang diberikan ke masyarakat berbeda dengan yang disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo dan pejabat negara. Hoaks lainnya seperti kandungan zat pada jenis vaksin tertentu masih diragukan status kehalalannya. Padahal, kesediaan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksinasi pertama menjadi bukti bahwa pemerintah sangat peduli akan kesehatan dan keselamatan warganya. MUI telah menyampaikan bahwa vaksinasi halal.

Ketakutan masyarakat mengenai kejadian pasca vaksinasi juga masih ditemukan dan menyebar begitu cepat, padahal Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sudah menjelaskan bahwa reaksi

yang dirasakan seseorang setelah vaksinasi adalah wajar karena hal itu merupakan respons tubuh dan bukti vaksin yang disuntikkan berkhasiat. Sebelum vaksin didistribusikan dan disuntikkan, telah melalui sejumlah tahapan uji klinis dan disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan vaksin.

Adanya penolakan vaksinasi di masyarakat juga disebabkan karena mereka tidak mendapatkan izin keluarga. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan agar keluarganya bersedia divaksinasi. Kesiediaan guru untuk divaksinasi akan berdampak positif di lingkungan sekitarnya. Guru seringkali dijadikan panutan sehingga guru yang telah divaksinasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi dan akhirnya mempercepat kekebalan kelompok (*herd immunity*).

ROYALTI MUSIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Tepatnya tanggal 30 Maret 2021 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini secara jelas mengatur dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar sejumlah royalti melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Disebutkan pula dalam PP ini bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial dan harus membayar royalti yakni seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek, konser musik. Selain itu, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, kegiatan pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi dan radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke. PP ini berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 31 Maret 2021.

Peraturan ini merupakan kabar gembira khususnya bagi musisi tanah air. Hasil karyanya telah dilindungi hukum dan memperoleh hak ekonomi. Akan tetapi, sebaliknya menjadi kabar buruk bagi pelaku usaha. Pemberlakuan PP ini menuai kontroversi karena momentumnya dinilai kurang tepat. Sejak Covid-19 melanda dunia dan tidak terkecuali Indonesia, sejumlah pelaku usaha harus berjuang mempertahankan usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Covid-19 mengakibatkan penghasilan di berbagai sektor usaha menjadi tidak menentu. Tidak sedikit pelaku usaha yang harus menutup

usahanya karena ketidakpastian penghasilan dan bahkan berujung pada penutupan usaha karena bangkrut. Royalti yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha atas penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik di tengah pandemi tentu dinilai memberatkan. Berlakunya PP ini, mengharuskan setiap pelaku usaha dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus patuh pada situasi apapun, tidak terkecuali di tengah pandemi Covid-19.

Kehadiran dan keberlangsungan usaha memberikan dampak positif pada pergerakan roda dan pemulihan perekonomian. Akan tetapi, di tengah pandemi Covid-19 justru mereka harus dibatasi kegiatan usahanya seperti pembatasan jam operasional. Hal ini menjadi sebuah dilema dan sekaligus kenyataan pahit yang harus hadapi oleh pelaku usaha di tengah pandemi. Berbagai strategi telah diupayakan oleh pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Penggunaan lagu dan/atau musik salah satunya, dan bahkan praktik ini telah dilakukan sebelum pandemi.

Penggunaan lagu dan/atau musik di tempat usaha dan bentuk layanan publik yang bersifat komersial merupakan faktor penting dalam mendukung keberlangsungannya. Selain itu, hal ini dapat berfungsi sebagai stimulus dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan jumlah pengunjung. Lagu dan/atau musik di tempat-tempat usaha hiburan sudah menjadi salah satu kebutuhan. Tempat usaha tanpa lagu dan/atau musik diibaratkan makan sayur tanpa penyedap masakan. Rasanya hambar. Tidak jarang tempat usaha ditinggalkan pelanggannya karena tidak menyuguhkan lagu dan/atau musik. Bagi sebagian pelanggan, alunan lagu dan/atau musik merupakan bagian dari servis untuk memuaskannya.

Sejak pandemi Covid-19, masyarakat kalangan tertentu memilih berkunjung ke tempat-tempat usaha hiburan untuk sekadar menghilangkan kebosanan dan membantu memulihkan semangat kerja dari padatnya rutinitas. Tidak jarang mereka memilih tempat yang ramai pengunjung. Faktanya, tempat-tempat usaha hiburan tersebut menyuguhkan lagu dan/atau musik. Tempat-tempat usaha hiburan tersebut merupakan salah satu tempat yang berpeluang menimbulkan kerumunan. Penulis telah melakukan survei terbatas di beberapa tempat usaha hiburan, hasilnya menunjukkan masih ditemukan pelanggan yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut tidak patuh protokol kesehatan

Covid-19. Praktik ketidakpatuhan yang lebih banyak dilakukan oleh pengunjung adalah tidak menjaga jarak aman dibandingkan mencuci tangan dan memakai masker.

Praktik ketidakpatuhan pengunjung saat mengunjungi tempat-tempat usaha hiburan di tengah pandemi dapat menjadi penyebab penyebaran Covid-19. Sehingga, pemberlakuan PP 56/2021 saat pandemi Covid-19 dinilai sudah tepat jika PP diterapkan hanya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kenyataannya, pemberlakuan PP 56/2021 tidak bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Meskipun pelaku usaha pengguna lagu dan/atau musik mengalami kesulitan berusaha di tengah pandemi, akan tetapi PP 56/2021 sudah resmi berlaku sejak diundangkan sehingga harus dipatuhi.

Lalu, bagaimana solusinya agar pelaku usaha tetap bertahan dengan usahanya, tetap menggunakan dan mampu membayar royalti musik di tengah gencarnya upaya menghilangkan Covid-19? Pemerintah harus hadir memberikan solusi bijaksana agar kesemuanya itu berjalan lancar tanpa menguntungkan kalangan masyarakat tertentu dan mengorbankan yang lainnya. Misalnya, pelaku usaha dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diberikan kesempatan untuk menjalankan usahanya tanpa pembatasan jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tegas dan ketat.

Solusi lainnya, pemerintah dapat memberikan keringanan pembayaran royalti berupa pemotongan jumlah royalti dengan besaran tertentu yang disepakati semua pihak baik kalangan musisi sebagai penerima royalti maupun pelaku usaha sebagai wajib bayar royalti. Selain itu, keringanan sistem pembayaran royalti dengan cara menyicil hingga kondisi keuangan usahanya stabil atau batas waktu terbentuknya LMKN dan sistem pendukungnya.

APAKAH VAKSINASI COVID-19 DI PEDESAAN GAGAL?

Tepatnya hari Senin, 19 April 2021 pukul 19.40 WITA salah seorang penulis berkomunikasi dengan orangtua melalui sambungan telepon. Beliau menetap di salah satu kampung di Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sebuah kampung yang letaknya sekitar 204 kilo meter dari Kota Makassar. Alhamdulillah, kabar keduanya sehat. Beliau tetap bersyukur dan menikmati kehidupannya di kampung. Bahkan, beliau tidak bersedia meninggalkan kampung halaman karena banyak kenangan yang sulit dilupakannya.

Beliau pun menanyakan kabar kami di Samarinda (Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, sebuah kota tetangga Calon Ibu Kota Negara RI yang baru). Alhamdulillah, kami pun semuanya sehat. Saya lalu menceritakan bahwa hari Senin, 12/4/2021 sekitar pukul 10.15 WITA waktu Samarinda, penulis telah divaksinasi Covid-19 pertama di kampus tempat mengabdikan. Tiba-tiba beliau diam dan tidak merespons. Tidak seperti biasanya. Pikiran penulis berkecamuk dan bertanya-tanya. Apakah ada yang salah dengan vaksinasi?.

Diamnya beliau karena menyangkan sikap penulis menerima vaksinasi. Sambil bertanya apakah vaksin itu sama dengan pasien? Rupanya, beliau tidak percaya vaksin yang disuntikkan tidak sebaik yang diberikan ke Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 dan 27 Januari 2021. Takut vaksin yang disuntikkan telah kadaluarsa. Bahkan, khawatir akan terjadi hal aneh sehingga masuk rumah sakit. Bukan tanpa alasan beliau khawatir, beberapa hari sebelumnya tersebar berita adanya salah satu petugas kesehatan yang divaksin lalu pingsan.

Perkataannya membuat penulis terdiam dan lemas tapi dalam hati berkata maafkan anakmu. Sejak kemunculan Covid-19 hingga ditemukannya vaksinasi sebagai sebuah harapan baru menghentikan ganasnya Covid-19, selama itu pula penulis terus menyadarkan orang lain tentang pentingnya mencegah Covid-19 dan vaksinasi sehingga lupa bahwa masih banyak kerabat yang miskin informasi vaksinasi. Terbukti, orangtua di kampung pun luput dari informasi mengenai vaksinasi secara lengkap.

Setelah suasana tenang dan terkendali, penulis lalu menjelaskan Covid-19 dan vaksinasi. Membutuhkan waktu 57 menit dari 72 menit lamanya mengobrol dengan beliau untuk menjelaskan secara detail tentang vaksinasi. Perlu kesabaran dan cukup ilmu tentang Covid-19 dan vaksinasi untuk menjelaskannya dengan lengkap. Nyatanya, tidak cukup dengan itu saja. Masih dibutuhkan lagi kelihaihan memainkan kata-kata yang mudah dipahami. Berbekal pengetahuan cukup tentang Covid-19 dan vaksinasi, akhirnya beliau paham dan bersedia mengikuti vaksinasi jika sudah jadwalnya memperoleh vaksinasi.

Sekarang sedang berlangsung vaksinasi Covid-19 terhadap petugas pelayanan publik dan lansia setelah petugas kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Tidak lama lagi akan disusul vaksinasi terhadap masyarakat umum. Kesalahpahaman masyarakat tentang Covid-19 dan vaksinasi dapat menghambat tercapainya kekebalan komunitas (*herd immunity*). Mungkinkah situasi demikian dapat dikendalikan?

Kurangnya pengetahuan dan kemauan warga menerima vaksinasi Covid-19 di pedesaan dapat disebabkan berbagai faktor, salah satunya ketakutan yang berlebihan tentang vaksinasi Covid-19. Ketakutannya semakin menjadi akibat *hoaks* yang begitu cepat sampai ke pelosok pedesaan. Ketidaktahuan dan kurang lengkapnya informasi vaksinasi menjadi sumber ketakutan masyarakat di pedesaan. Bahayanya, ketakutan yang berlebihan tentang vaksinasi Covid-19 berpotensi terjadinya penolakan massal vaksinasi. Parahnya lagi jika warga yang menolak vaksinasi melakukan provokasi anti vaksin di lingkungannya yang miskin informasi vaksinasi.

Masih cukup ruang dan waktu untuk menyembuhkan dan memulihkan rasa ketakutan berlebihan masyarakat di pedesaan. Tidak perlu menunda lagi untuk melancarkan sosialisasi vaksinasi. Sosialisasi

yang massif dan terencana dapat menghilangkan ketidakpercayaan warga terhadap vaksinasi. Semua elemen masyarakat dapat mengambil peran sesuai kemampuan dan kelebihan masing-masing. Kemampuan komunikasi dan pengetahuan yang mumpuni tentang vaksinasi juga menjadi kunci suksesnya sosialisasi vaksinasi.

Tenaga kesehatan dan pelayanan publik yang telah divaksinasi berfungsi selain edukator vaksinasi Covid-19 juga menjadi panutan di lingkungannya. Pemerintah desa/kelurahan bersama ketua RT dan tokoh masyarakat dapat menjadi garda terdepan. Generasi milenial yang belum terpapar *hoaks* vaksinasi juga menjadi harapan besar. Tidak terkecuali peran media massa sangat dinantikan kehadirannya dalam mencegah *hoaks* dengan menyajikan informasi akurat dan terpercaya tentang vaksinasi COVID-19.

GENERASI MILENIAL (TIDAK) TANGGAP COVID-19

Biro Pusat Statistik (BPS) telah merilis data hasil Sensus Penduduk Indonesia (SPI) 2020 pada tanggal 21 Januari 2021, tepat sekitar tiga bulan lalu di Jakarta. BPS dalam penyampaiannya menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa, terjadi penambahan 32,56 juta jiwa dibandingkan 10 tahun lalu. Menurut William H. Frey tentang kategori generasi, BPS menempatkan generasi Y atau generasi milenial (lahir 1981-1996) dan generasi Z atau pasca milenial (lahir 1997-2012) mendominasi populasi penduduk Indonesia. Tidak main-main, jumlahnya mencapai angka masing-masing 69,90 juta (25,87 persen) dan 75,49 juta (27,94 persen).

Lebih dari separuh atau 53,81 persen populasi penduduk Indonesia merupakan generasi muda usia produktif. Jumlah yang sangat fantastis dibandingkan kelompok generasi lainnya. Kita dapat membayangkan Indonesia akan lebih maju pada masa yang akan datang. Generasi muda merupakan pengendali estafet keberlangsungan pembangunan bangsa. Para pakar dan ilmuwan memberikan tanggapan positif mengenai generasi milenial. Menurutnya, generasi milenial dan generasi Z akan mendorong laju percepatan pembangunan Indonesia karena mereka sangat mudah beradaptasi dengan teknologi informasi. Terbukti, generasi milenial yang melek teknologi, banyak yang sukses menjadi *selebgram*, *youtuber*, *penulis hebat*, *graphic designer*, *analis data*, dan *profesi berbasis teknologi lainnya*.

Wajar. Sebagai raja pengguna teknologi informasi saat ini, peluang generasi milenial menjadi pengusaha sukses sangat rasional. Akan tetapi, kenyatannya hingga pengujung tahun 2020, jumlah pengusaha Indonesia

masih berkisar 3,5 persen dari total populasi penduduk. Pencapaiannya lebih rendah dibandingkan negara lainnya seperti China 10 persen dan Jepang 11 persen. Rupanya, masih dibutuhkan kerja keras dan cerdas untuk mencapai target 10 persen pengusaha dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2045. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan sejumlah program strategis melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi, kita tidak perlu merasa khawatir mengenai hal itu.

Suksesnya generasi milenial di berbagai profesi berbasis teknologi, tentunya menjadi harapan besar dalam membantu pemerintah menangani persoalan serius yang sedang dihadapi Indonesia sejak setahun lalu. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan tidak sedikit sumber daya yang telah dikerahkan untuk mengatasinya. Bukan hanya karena porak-porandanya kondisi ekonomi akibat pandemi sehingga pemerintah serius menangani Covid-19, melainkan telah menelan banyak korban meninggal dunia. Tidak sedikit keluarga yang sedih karena kehilangan anggota keluarga akibat ganasnya Covid-19. Pertanyaannya, apakah generasi milenial yang cakap teknologi akan peduli di masa peperangan melawan Covid-19 atau justru sebaliknya? Jumlahnya yang fantastis itu, apakah menjadi tambahan kekuatan atau justru sebaliknya?

Generasi milenial identik dengan teknologi. Tiada hari tanpa perangkat teknologi di genggamannya seperti gadget. Tidak jarang mereka saling berkomunikasi dan bahkan bertemu di suatu tempat karena bantuan gadget. Mereka lalu berkumpul, bercengkerama bersama, tertawa lepas dan sesekali saling menyindir bahkan mengumpat. Seolah tanpa beban dan tidak ada rasa kecemasan di tengah pandemi Covid-19. Saat pemerintah dan banyak pihak yang peduli berpacu dengan waktu mengusir Covid-19 dari tanah air, generasi milenial justru mempertontonkan praktik ketidakpatuhan protokol kesehatan.



Gambar 3. Kaum milenial di salah satu kafe di Kota Tepian

Ketidakpatuhan protokol kesehatan yang dipraktikkan generasi milenial di masa pandemi didukung dengan hasil survei yang telah dilaksanakan BPS tanggal 7-14 September 2020. Sebanyak 70,59 persen dari 100 persen responden yang dipilih berusia 17-45 tahun dalam survei tersebut. Hasilnya 18,1 persen yang jarang dan bahkan tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Selain itu, ditemukan 58,7 persen tidak mencuci tangan, 42,4 persen yang masih berjabat tangan saat berjumpa orang lain, sebanyak 55,7 persen yang belum mampu menghindari kerumunan, dan 62,8 persen generasi milenial yang masih sulit dan tidak menjaga jarak aman saat berkumpul. Tidak mengherankan jika hingga hari ini masih sering kita temukan generasi milenial yang berkumpul dan mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai himbuan dan kebijakan pemerintah.

Sedih dan kecewa. Itulah kalimat yang tepat bagi generasi milenial yang tidak peduli Covid-19. Lalu, apa yang dapat diharapkan dari generasi milenial yang masih tidak peduli Covid-19? Perilaku generasi milenial yang tidak patuh protokol kesehatan justru dapat menjadi sumber penularan baru Covid-19 di antara mereka dan bahkan keluarganya di rumah. Selain itu, perilaku tersebut akan mempengaruhi lambatnya waktu pencapaian

kekebalan komunitas (*herd immunity*) melalui vaksinasi. Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung sejak 13 Januari 2021 hingga sekarang. Pemberian vaksinasi pertama kepada Presiden Joko Widodo diikuti sejumlah pejabat negara. Saat itu juga tidak ketinggalan presenter dan aktor hebat Raffi Ahmad ikut divaksinasi mewakili generasi milenial. Hal ini merupakan wujud kepedulian bersama memerangi Covid-19 di tanah air.

Generasi milenial yang masih tidak peduli Covid-19 dapat menjadi penghambat suksesnya vaksinasi. Dapat dibayangkan jika generasi milenial yang jumlahnya melebihi separuh populasi penduduk Indonesia, maka target 70 persen populasi yang divaksinasi untuk mencapai *herd immunity* mustahil dicapai. Generasi milenial diharapkan bukan hanya sukses dalam profesinya yang didukung teknologi informasi, melainkan juga sukses dan terdepan dalam menyampaikan informasi Covid-19 dan bahkan menjadi relawan vaksinasi di lingkungannya.

Gadget yang setiap saat di genggamannya, kini selain berfungsi media komunikasi dan pendukung kegiatan usahanya juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi yang dinilai efektif dan efisien di tengah pandemi Covid-19. Jumlah generasi milenial yang mencapai lebih separuh populasi Indonesia, jika diberdayakan dan dikelola secara tepat, maka tentu mampu menjangkau dan mendampingi secara *one by one* generasi lainnya. Pemberdayaan generasi milenial dengan membekali ilmu pengetahuan cukup tentang Covid-19 perlu digalakkan agar mampu mencetak relawan edukator dan vaksinasi Covid-19 di lingkungannya melalui teknologi informasi. Tidak butuh waktu lama, peperangan melawan Covid-19 pasti berakhir dan kemenangan akan dicapai berkat peran generasi milenial.

Selain memberdayakan generasi milenial yang belum peduli Covid-19, masih terdapat harapan besar pada generasi milenial yang peduli Covid-19. Mereka menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk melancarkan sejumlah aksi positif dalam mendukung pemerintah menangani Covid-19. Terbukti, tidak sedikit selebgram, youtuber, dan penggiat sosial media lainnya berlomba-lomba memberikan pendidikan Covid-19 dan vaksinasi kepada masyarakat melalui teknologi informasi. Tidak jarang dari mereka bersedia menjadi orang pertama menerima vaksinasi di lingkungannya. Mereka melakukan aksi tanpa mengharapkan

sensasi dan popularitas. Generasi milenial peduli Covid-19 hadir dan proaktif karena komitmen dan kepeduliannya serta cintanya yang amat besar bagi bangsa Indonesia.

APAKAH INDONESIA SIAP JIKA COVID-19 BERLANGSUNG PERMANEN?

Kehadiran Covid-19 sejak akhir tahun 2019 telah menggemparkan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hampir semua aspek kehidupan menjadi terdampak karena Covid-19. Bahkan, tidak sedikit korban meninggal dunia. Meskipun, tingkat kematiannya per 29/4/2021 secara nasional masih 2,7, artinya terdapat 2-3 kematian setiap 100 kasus Covid-19, akan tetapi angka ini sebagai pertanda bahwa Covid-19 mengancam kelangsungan hidup manusia.

Dampaknya yang mengganggu dan membahayakan, mengusik ketenangan semua orang, dan berharap pandemi ini segera berakhir. Akan tetapi, praktik ketidakpatuhan masih saja terjadi dimana-mana. Apalagi saat menjelang lebaran Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, sejumlah area tertentu seperti pusat perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional diserbu oleh warga. Tidak sedikit yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Begitu pula program vaksinasi, hingga hari ini (29/4/2021), sasaran yang berhasil divaksinasi mencapai 12.280.765 orang dari 181.554.565 warga yang menjadi sasaran vaksinasi atau masih menyisakan 169.273.800 orang (93,24%). Angkanya masih cukup banyak. Diperlukan waktu sekitar 564 hari lagi jika kemampuan vaksinator hanya 300.000 dosis vaksin setiap harinya. Butuh waktu sekitar 1,5 tahun lagi untuk menuntaskan sasaran vaksinasi. Jika dihitung-hitung, program vaksinasi akan tuntas pada akhir tahun 2022. Masih cukup lama.

Belum lagi ketersediaan stok vaksin masih butuh perjuangan dalam mendapatkannya, akan tetapi hal tersebut terus diupayakan oleh Pemerintah Indonesia agar jumlahnya mencukupi dan bahkan melebihi

jumlah sasaran yang akan divaksinasi. Selain itu, kemunculan varian baru Covid-19 di sejumlah negara juga menambah persoalan dalam pengendalian Covid-19. Seorang kolomnis opini Bloomberg pada tanggal 24 Maret 2021, Andreas Kluth menuliskan bahwa Covid-19 dapat menjadi musuh permanen seperti flu tetapi lebih buruk. Apakah Indonesia telah siap menghadapi kondisi buruk ini?.

Kesiapan pemerintah menghadapi kondisi terburuk Covid-19 yang berkepanjangan dan bahkan permanen, telah dibuktikan dengan sejumlah kebijakan dan program. Berdasarkan rekomendasi WHO dan pendapat para ahli yang memprediksi bahwa pandemi Covid-19 dapat dihilangkan jika tercapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pemerintah Indonesia langsung tancap gas menggalakkan program vaksinasi. Kekebalan kelompok dapat dicapai jika sebagian besar warga bersedia menerima vaksinasi.

Apakah masalahnya hanya sampai di situ saja? Ternyata tidak. Tantangan terberat adalah masih adanya warga yang tidak bersedia menerima vaksinasi dengan sejumlah alasan. Parahnya lagi, banyak warga yang menolak dengan alasan yang mengada-ada seperti masih percaya konspirasi Covid-19, keamanan vaksin, status kehalalan, dan efektivitas vaksin. Padahal, WHO, pemerintah, badan independen yang berwenang mengeluarkan izin pemakaian vaksin seperti BPOM, dan bahkan MUI telah membuktikan, merekomendasikan, dan menyerukan bahwa Covid-19 itu nyata adanya, sudah banyak kasus kematian, vaksin aman, halal, dan tingkat efikasi semua jenis vaksin telah memenuhi standar.

Pemerintah Indonesia tidak ingin berlarut-larut dalam kemelut persoalan penolakan vaksinasi oleh warganya sendiri, dibuktikan dengan semakin gencarnya sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia. Tidak ketinggalan pula sejumlah komponen masyarakat ikut serta dalam mengampanyekan program vaksinasi aman dan bahkan menjadi pelopor gerakan vaksinasi di tempat kerjanya dan lingkungannya. Mengapa semua komponen bangsa harus terlibat? Permasalahan Covid-19 sangat kompleks sehingga harus dihadapi secara bersama, budaya gotong royong harus tetap dibangkitkan sebagai salah satu ciri budaya masyarakat Indonesia yang telah dikenal dunia sejak lama.

Faktanya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak warga yang tidak patuh protokol kesehatan dan bahkan tidak sedikit yang menolak vaksinasi. Fenomena ini akan memperkuat opini Andreas Kluth dan bisa menjadi kenyataan. Pertanyaannya, mengapa masih ada warga tidak mau sedikitpun berkorban untuk kepentingan bersama? Apakah mereka memang tidak peduli dan tidak merasakan kecemasan sedikit pun jika Covid-19 bersifat permanen?

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap sepuluh warga yang tidak patuh protokol kesehatan dan menolak menerima vaksinasi, semuanya memberikan tanggapan yang menurut penulis justru berbanding terbalik dengan sikapnya. Mereka yang tidak patuh dan menolak menerima vaksinasi, sangat menginginkan Covid-19 segera menghilang dan tidak bersifat permanen. Sangat kontradiksi. Mereka tidak mau pandemi tetap bertahan dan selamanya ada di Indonesia, tetapi justru menunjukkan perilaku berisiko penyebaran Covid-19.

Lalu, bagaimana kira-kira treatment yang tepat bagi mereka? Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebaiknya mengingat kembali sejumlah kebijakan pemerintah di masa lalu yang menimbulkan kontroversi, tetapi akhirnya warga memilih melaksanakannya hingga sekarang. Pertama, kebijakan pengalihan penggunaan bahan bakar dari minyak tanah menjadi gas elpiji. Awalnya banyak warga yang menolak, tetapi akhirnya menerima, dan bahkan warga rela berpanas-panasan mengantri untuk mendapatkan gas elpiji. Kedua, kebijakan BPJS kesehatan, dimana banyak warga yang menolak dan tidak mau menjadi peserta BPJS, tetapi akhirnya menerima, dan bahkan rela mengantri berjam-jam untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta mandiri BPJS kesehatan.

Memang, kedua kasus kontroversial tersebut berbeda konteks dengan vaksinasi. Gas elpiji dan BPJS kesehatan sudah menjadi kebutuhan sebagian besar warga. Akan tetapi, tidak salah jika belajar dari strategi yang diterapkan kala itu, sehingga kontroversi menjadi diterima oleh sebagian besar warga. Pemerintah melakukan pembatasan pasokan bahan bakar minyak, tetapi secara bersamaan memudahkan warga dalam memperoleh gas elpiji disertai sejumlah fasilitas subsidi. Sedangkan, pada kasus kontroversi BPJS kesehatan, pemerintah melakukan inventarisasi

kepada warga yang perlu digratiskan, diberikan subsidi, dan membayar penuh secara mandiri tanpa disubsidi oleh pemerintah.

Belajar dari kedua kasus yang menimbulkan kontroversi tersebut, sebenarnya pemerintah telah menerapkan sejumlah strategi dalam mengendalikan Covid-19 dan mensukseskan vaksinasi baik melalui kementerian terkait maupun kerja sama sejumlah BUMN dan perbankan atau penyedia jasa keuangan lainnya. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan bahan pokok dan subsidi pembayaran sejumlah kebutuhan mendasar warga seperti keringanan pembayaran tagihan PLN, PDAM, pendidikan anak, dan bahkan keringanan pembayaran tagihan kendaraan bermotor. Akan tetapi, program-program yang dihadirkan tersebut masih kurang menyentuh kesadaran warga dalam mendukung suksesnya program pengendalian Covid-19 yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Strategi pembatasan pasokan khususnya pemenuhan kebutuhan vaksinasi, sulit untuk diterapkan oleh pemerintah karena saat ini semua negara di dunia bahkan berlomba-lomba memperoleh pasokan vaksin. Akan tetapi, kebijakan pembatasan pemberian subsidi dan bantuan bahan pokok selama Covid-19 khususnya bagi warga yang tidak bersedia menerima vaksinasi, sangat mungkin untuk diberlakukan.

Olehnya itu, selain menggencarkan aksi kampanye vaksinasi aman disertai sosialisasi kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan, pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan inventarisasi dan peninjauan ulang database warga yang dikategorikan sebagai penerima bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama Covid-19. Jika ditemukan warga sebagai penerima subsidi dan bantuan selama Covid-19, tetapi terbukti tidak patuh protokol dan menolak menerima vaksinasi, maka pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan kembali dan dapat mengubah statusnya dari penerima subsidi dan bantuan menjadi bukan penerima lagi.

Selain itu, pemerintah tetap konsisten menerapkan kebijakan pembatasan secara administrasi khusus bagi warga yang tidak patuh dan menolak menerima vaksinasi seperti yang sementara dijalankan hingga saat ini. Bagi mereka yang menolak vaksinasi, tetap diwajibkan tes antigen dan swab test saat hendak mengakses tempat atau fasilitas umum dan keperluan bepergian. Bahkan, jika diperlukan, merevisi

kebijakan untuk penambahan biaya pemeriksaan tes tersebut. Sebaliknya, warga yang bersedia menerima vaksinasi, sudah selayaknya diberikan penghargaan seperti kemudahan dalam mengakses tempat atau fasilitas umum dan kesempatan bepergian tanpa harus mengikuti tes, cukup dengan melampirkan sertifikat pernah menerima vaksinasi. Sertifikat seolah tidak berarti jika tidak dihargai, sebaliknya sangat berarti jika dihargai.

RUMAH BELAJAR COVID-19; SOLUSI BELAJAR ANAK DI MASA PANDEMI

Covid-19 hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tandanya untuk hilang dari tanah air. Padahal, seluruh komponen bangsa telah berupaya maksimal dalam mengentaskannya. Tidak terkecuali, dunia pendidikan pun terdampak adanya Covid-19.

Pemerintah sigap mengambil sikap dalam mengantisipasi keterlambatan pembelajaran yang dialami siswa. Sejumlah satuan pendidikan diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, akan tetapi jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan jumlah yang pembelajaran daring.

Sebagian besar daerah di Indonesia masih memilih pembelajaran secara daring. Hal ini dipilih untuk menghindari penyebaran penularan Covid-19 yang disebabkan kerumunan siswa. Akibatnya, tidak sedikit di antaranya sejak terdaftar siswa baru di tahun lalu, belum pernah bertemu dengan gurunya dan bersosialisasi langsung teman-temannya sesama siswa.

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi perkembangan pembelajaran siswa baik aspek pengetahuan, sikap maupun praktik siswa. Parahnya lagi jika siswa tersebut berdomisili di daerah yang masih terbatas dalam mengakses teknologi informasi.

Situasi seperti ini semakin dipersulit jika orangtua belum melek teknologi. Pembelajaran sang anak pasti menjadi terkendala dibandingkan siswa yang orangtuanya melek teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah terobosan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Rumah Belajar Covid-19 adalah salah satu solusinya. Lalu, apa tujuan pendiriannya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana program rumah belajar Covid-19 ini dijalankan?

Rumah belajar Covid-19 bertujuan untuk membantu siswa agar tidak mengalami ketertinggalan pembelajaran. Selain itu, siswa akan disugahi materi kebangsaan, Pancasila, disertai praktik keagamaan. Sesuai dengan nama programnya, siswa di sini juga akan dibekali pengetahuan dan praktik siswa tentang Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar siswa telah siap saat pemberlakuan pembelajaran tatap muka dan sekaligus berfungsi sebagai peer educator kepada teman-temannya.

Rumah Belajar Covid-19 dapat diprakarsai dan dijalankan oleh relawan pendidikan anak. Siapa pun yang peduli dengan pendidikan anak, dapat terlibat pada program ini. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam program ini pun sifatnya mandiri. Artinya, program ini hadir dari dan untuk warga demi keberlangsungan pendidikan anak. Akan tetapi, tidak menutup peluang bagi warga atau relawan yang ingin menjadi donatur.



Gambar 4. Seorang mahasiswa Universitas Mulawarman sedang mengajar di salah satu SD di Kota Samarinda

Program rumah belajar Covid-19 dalam operasionalnya disesuaikan dengan situasi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah. Minimal terdiri dari seorang calon pendidik di bidang kewarganegaraan dan Pancasila, seorang calon pendidik di bidang keagamaan, dan seorang lagi calon pendidik yang memahami Covid-19.

Pada praktiknya, program rumah belajar Covid-19 dapat memilih sasaran anak usia sekolah di setiap RT, minimal dua orang siswa sebagai perwakilan tiap RT. Pemilihan peserta yang terlibat dalam program ini dengan mempertimbangkan kapasitas tempat belajar, kesiapan SDM tenaga pendidik, dan efektivitas program.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan memperhatikan jumlah siswa dalam setiap pertemuan. Program ini dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, mencuci atau membersihkan tangan, dan memakai masker.

Pembatasan jumlah peserta dalam program ini juga dilakukan karena siswa yang telah mengikuti program nantinya akan menjadi pendidik terhadap sebayanya. Estimasi pelaksanaan program ini sekitar dua hingga tiga bulan dengan berbagai materi disertai praktik simulasi.

Pelaksanaannya pun fleksibel, dapat disesuaikan dengan waktu relawan dalam mendidik dan kesanggupan calon siswa. Penulis dan beberapa relawan di bidang pendidikan masih tahap finalisasi pelaksanaan program ini.

Penulis berharap melalui tulisan ini, akan bertambah lagi jumlah relawan di seluruh daerah di Indonesia. Mari melakukan hal-hal kecil tetapi berarti bagi kemajuan pendidikan anak Indonesia, khususnya di masa sulit seperti saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang bermanfaat. Segera dan saatnya kita bergerak bersama demi mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik.

Keberhasilan program ini tentu perlu dukungan dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat, generasi muda, dan orangtua siswa. Selain itu, pelibatan pihak sekolah juga menjadi amunisi tambahan dalam mensukseskan program rumah belajar Covid-19.

APAKAH LARANGAN MUDIK LEBARAN SIA-SIA?

Kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini menjadi sorotan publik. Tidak sedikit warga yang harus rela menunda mudik untuk bertemu dengan keluarganya. Apakah mereka kecewa? Pasti. Mudik lebaran yang telah direncanakan sejak lama, dan bahkan sudah membeli oleh-oleh buat keluarganya di kampung halaman, kini harus menelan kekecewaan. Pasalnya, pemerintah telah melakukan larangan mudik dan telah diberlakukan sejak hari ini (6/5/2021) di berbagai daerah di Indonesia. Petugas telah melakukan penyekatan di berbagai titik perbatasan antar daerah.

Putar balik, itulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh calon pemudik saat memasuki perbatasan antar kabupaten/kota dan provinsi. Apakah kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini berdampak positif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 atau sebaliknya? Tentunya berdampak positif. Calon pemudik dan keluarga yang akan dikunjungi di kampung halaman, sama-sama tidak berisiko tertular atau pun menularkan Covid-19.

Tidak dapat disangkal bahwa penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik perbatasan antar daerah yang bertujuan membatasi warga keluar dan masuk daerah tertentu merupakan sebuah solusi untuk menekan penyebaran Covid-19. Akan tetapi, ada permasalahan klasik yang lebih penting lagi untuk ditingkatkan yakni mendorong dan menjaga perilaku kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Sebagian besar warga Indonesia sudah menjadikan mudik lebaran sebagai sebuah tradisi tahunan. Sehingga, wajar jika terjadi kontroversi kebijakan larangan mudik diberlakukan. Akan tetapi, bukankah menjaga kesehatan diri dan keluarga jauh lebih penting dibandingkan mudik

lebaran dan menjadi sumber atau korban Covid-19? Silahkan dijawab di dalam hatinya masing-masing.

Selain fenomena mudik yang menjadi sorotan di masa pandemi ini, ada fenomena klasik lainnya yang terjadi di masyarakat menjelang hari lebaran yakni sejumlah tempat perbelanjaan menjadi ramai pengunjung. Tidak terkecuali beberapa tempat untuk sekadar berbuka puasa atau makan bersama keluarga seperti kafe dan restoran pun ramai dikunjungi warga. Pertanyaannya, apakah kepatuhan pengunjung terhadap protokol kesehatan Covid-19 telah dipraktikkan di tempat-tempat tersebut?

Faktanya, masih banyak pengunjung yang tidak mematuhi, padahal pihak pengelola tempat perbelanjaan dan pemilik tempat makan telah menyediakan sejumlah fasilitas pendukung praktik kepatuhan protokol kesehatan. Akan tetapi, sekali lagi bahwa masih ada pengunjung yang tidak memanfaatkan sarana cuci tangan, tidak menjaga jarak aman, dan bahkan masih ada yang tidak memakai masker secara benar.

Praktik ketidakpatuhan protokol kesehatan yang masih dilakukan sebagian warga merupakan permasalahan yang harusnya dituntaskan lebih dulu dibandingkan larangan mudik lebaran. Kebijakan larangan mudik lebaran akan menjadi sia-sia, jika warga masih saja tidak mematuhi protokol kesehatan.



Gambar 5. Salah satu tempat usaha yang menerapkan protokol kesehatan

Pengorbanan sebagian warga yang membatalkan mudiknya baik karena kesadaran sendiri maupun secara terpaksa karena adanya larangan, sudah sepatutnya dihargai dan dihormati khususnya oleh warga yang tidak merencanakan mudik lebaran tetapi tidak patuh pada protokol kesehatan. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah mempraktikkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Jika masih saja ada warga yang tidak merencanakan mudik lebaran tetapi justru tidak patuh protokol kesehatan, maka alangkah bijaksananya kebijakan larangan mudik tersebut dicabut dan membolehkan para calon pemudik untuk mudik lebaran dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sejak hari ini, sebagian besar petugas yang tergabung dalam Satgas penanggulangan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, mengerahkan segala kekuatan terbaiknya untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan dengan baik, akan tetapi pada sejumlah tempat-tempat berisiko

penularan Covid-19 yang disebabkan kerumunan warga, justru tidak dijaga secara ketat oleh petugas seperti halnya yang dilakukan di perbatasan antar daerah.

Olehnya itu, perlu dilakukan pendistribusian petugas secara proporsional, tidak hanya konsentrasi di perbatasan antar daerah untuk menghalangi warga yang akan mudik lebaran, tetapi tetap konsisten melakukan pemantauan di tempat-tempat atau fasilitas umum yang rawan kerumunan. Selain untuk menghimbau dan memonitoring kepatuhan pengunjung terhadap protokol kesehatan, petugas juga secara langsung memastikan bahwa pengelola atau pemilik tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan telah menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini penting dilakukan agar kebijakan larangan mudik lebaran tidak sia-sia.

TERNYATA, USAHA INI MAMPU BERTAHAN DI MASA PANDEMI

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari setahun di Indonesia. Sepertinya pandemi masih akan tetap bertahan, entah sampai kapan. Belum ada seorang pun yang mampu memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang sulit mempertahankan usahanya, sehingga berakhir pada penutupan usaha karena mengalami kebangkrutan.

Lebih menyedihkan lagi, banyak karyawan yang kehilangan penghasilan karena diberhentikan dari tempat kerjanya. Pelaku usaha tidak mampu lagi mempertahankan karyawannya karena ketidakpastian penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya.

Jika Covid-19 masih tetap bertahan hingga beberapa bulan lagi, apalagi sampai hitungan tahun, maka dapat dipastikan bahwa makin bertambah banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar, dan tentu makin banyak pula jumlah pengangguran karena kehilangan pekerjaan.

Pandemi Covid-19 menjadi bencana besar khususnya bagi pelaku usaha, akan tetapi meski demikian tetap ada hikmah di balik kejadiannya. Pandemi ini hadir sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi pelaku usaha agar lebih kreatif dan inovatif dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah pandemi.

Sejumlah pelaku usaha memilih memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi. Pilihan ini sebagai sebuah strategi dalam membantu pelaku usaha untuk memasarkan produk usahanya. Sebagian masih mampu bertahan, namun sebagian lainnya tetap tidak berhasil menyelamatkan usahanya.

Pertanyaannya, apakah masih ada jenis usaha yang mampu bertahan di masa pandemi? Apakah dengan bantuan teknologi informasi yang membuat usahanya mampu diselamatkan? Penulis lalu mencoba mendatangi salah satu outlet usaha minuman jamu dan herbal di Kota Samarinda, kota tempat tinggal penulis.

Penulis memilih outlet ini untuk dilakukan wawancara kepada pemilik dan juga pembelinya. Penulis menyaksikan bahwa pemilik usaha yang satu ini, masih tetap sibuk melayani sejumlah pembeli khususnya pada malam hari. Tidak seperti pada usaha lain di sekitarnya yang tampak sepi pengunjung sejak adanya pandemi.



Gambar 6. Outlet jamu dan herbal yang mampu bertahan dan bahkan tetap meraup keuntungan di masa pandemi

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan pemilik outlet jamu dan herbal tersebut, diperoleh informasi yang membuat penulis kaget dan seolah tidak percaya. Pertama, di awal pandemi, outlet ini justru mampu meraup keuntungan yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya,

sebelum adanya Covid-19. Kedua, pemilik outlet belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu cara dalam meningkatkan penjualan produk.

Pemilik outlet menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu media untuk membantu meningkatkan penjualan produk saat ini, akan tetapi sejak outlet ini beroperasi sekitar 10 tahun lalu hingga sekarang, pemilik belum memanfaatkan teknologi informasi. Alasannya karena pelanggan di outletnya lebih banyak yang memilih datang berbelanja secara langsung.

Informasi yang dikumpulkan penulis tidak hanya pada pemilik outlet saja, akan tetapi penulis juga mencoba mewawancarai beberapa pembeli untuk mengetahui alasan mereka tetap meminum jamu dan herbal, serta alasan memilih outlet ini dibandingkan outlet lainnya yang menjual produk serupa.

Berbagai alasan pembeli antara lain untuk menjaga daya tahan tubuh tetap sehat agar terhindar dari penularan Covid-19. Alasan lainnya adalah pemilik outlet memberikan pelayanan yang memuaskan, harga produknya tetap sama sebelum pandemi, tempatnya bersih, aksesnya mudah dijangkau, dan selalu mempraktikkan protokol kesehatan.

Kini, penulis sudah menemukan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, bahwa pemilik mampu mempertahankan usahanya dan bahkan tetap meraup keuntungan di tengah pandemi karena menerapkan berbagai strategi yang mumpuni. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan pemilik outlet tersebut dapat dijadikan contoh bagi pelaku usaha lainnya agar mereka juga mampu mempertahankan usahanya dan berhasil melewati masa sulit ini.

SILATURAHMI ONLINE, MENGAPA MESTI ALERGI?

Tinggal beberapa hari lagi, khususnya bagi kaum muslimin di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia, akan merayakan momentum hari lebaran atau Idul Fitri. Menjelang lebaran dan bahkan beberapa bulan sebelumnya, warga telah merencanakan mudik untuk menemui keluarganya di kampung halaman. Seorang anak mudik menemui orangtuanya, seorang suami mudik menemui istrinya, kerabat mudik menemui kerabatnya, dan mudik sudah menjadi tradisi warga setiap tahunnya.

Setidaknya sudah dua kali lebaran, tahun lalu dan tahun ini, persoalan mudik selalu menjadi kontroversi. Menyikapi tradisi mudik warga pada tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan mudik. Sebagian warga bersedih karena pupus harapannya untuk bertemu langsung dengan keluarganya, tetapi sebagian lainnya menganggap kebijakan larangan mudik ini alternatif terbaik dalam mengendalikan Covid-19.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran, tentunya dengan penuh pertimbangan dan alasan tertentu. Intinya, mencegah penyebaran Covid-19. Keberadaan Covid-19 yang belum kunjung berkesudahan, sudah sepatutnya menjadi tugas bersama seluruh komponen bangsa. Warga yang peduli Covid-19, berusaha menghilangkan egonya, menahan diri untuk tidak mudik lebaran. Meluapkan kerinduan kepada keluarga pada momentum lebaran memang wajar, akan tetapi menahan rasa rindu lebih penting di masa pandemi.

Covid-19 telah berdampak luas dan mengubah segalanya, bahkan menelan korban puluhan ribu warga Indonesia. Apakah Anda tidak peduli

dengan kesehatan keluarga di kampung halaman? Pasti peduli. Olehnya itu, memilih sabar dalam menahan rindu, selain menunjukkan kepatuhan sebagai warga negara, juga melindungi keluarga di kampung halaman dari paparan Covid-19.

Larangan mudik lebaran menjadi pilihan terbaik dalam mencegah penularan Covid-19. Pemerintah pastinya menyadari bahwa kebijakan ini akan menimbulkan dampak psikologis warga yang luar biasa, akan tetapi keselamatan warga adalah nomor satu. Pemerintah berupaya maksimal mencegah penyebaran Covid-19 sehingga warga tetap sehat dan terlindungi dari penularan Covid-19.

Kebijakan larangan mudik, baik langsung dan tidak langsung, akan mengurangi dan menghilangkan kerumunan warga di sejumlah fasilitas umum seperti terminal, pelabuhan dan bandara. Selain itu, kontak fisik langsung di antara warga tidak akan terjadi. Berkurangnya atau tidak adanya kerumunan dan kontak langsung, akan menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini pula yang mendasari mengapa pemerintah melarang mudik lebaran di masa pandemi. Calon pemudik dan keluarga di kampung halaman akan tetap sehat dan aman dari penularan Covid-19.

Sejak Covid-19 makin meluas di Indonesia, warga dihadapkan dan berusaha beradaptasi dengan perubahan kebiasaan baru. Warga semakin dekat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya, di bidang pendidikan, siswa banyak belajar di rumah secara online. Begitu pula di sektor usaha, warga terbiasa menjajakan produknya melalui sosial media, sebaliknya pembeli pun memanfaatkan teknologi dalam berbelanja kebutuhannya.

Lalu, bagaimana agar nilai-nilai lebaran tetap dirasakan ada di antara dua keluarga yang saling berjauhan? Solusinya, silaturahmi secara online. Era teknologi saat ini telah memfasilitasi kebutuhan warga tersebut. Bahkan, sebelum adanya Covid-19, masyarakat telah terbiasa berkomunikasi melalui daring. Apakah ada yang berbeda jika silaturahmi dilakukan secara online dibandingkan tatap muka langsung? Pasti berbeda. Tetapi, bukankah saling menjaga dan melindungi diri dan keluarga dari Covid-19, akan lebih baik dibandingkan mudik lebaran dan menjadi sumber ataupun korban penularan Covid-19? Cukup Anda jawab dalam hati masing-masing secara jujur.

Apakah Anda masih ingat dulu, saat ingin mengatakan rasa cinta kepada pujaan hatinya? Hanya lewat sepucuk surat, bahkan berhari-hari baru diterima dan dibaca olehnya. Suratnya diterima, rasa cintanya terbalaskan, lalu sepucuk surat balasan pun menyusul. Hal itu berjalan cukup baik tanpa kedua belah pihak harus bertemu langsung. Cukup dengan sepucuk surat dan bantuan petugas pos, semuanya berlangsung sesuai keinginan.

Begitu pula, waktu sekolah zaman dulu. Dipisahkan pulau, lautan luas, berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer dengan keluarga. Belum tersedia teknologi seperti sekarang ini. Akhirnya, kerinduan berkomunikasi antara anak dan orangtuanya, suami dengan istrinya, dan seorang sahabat dengan sahabatnya, semuanya berharap hanya pada fasilitas surat-menyurat. Butuh berhari-hari untuk sekadar hanya mengetahui kabar keluarga. Apakah cara-cara lama itu mengurangi maksud dan tujuan yang hendak dicapai? Tidak, cukup dengan bersabar beberapa hari, kedua belah pihak dapat melepas kerinduannya.

Apalagi di era teknologi informasi saat ini, tidak butuh waktu berhari-hari lagi untuk melepas kerinduan dengan keluarga. Semuanya terpenuhi hanya dalam hitungan detik. Memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana dalam memenuhi segala kebutuhan seseorang, tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Begitu pula, silaturahmi di momen hari lebaran melalui online, mengapa tidak? Warga sudah terbiasa dengan gadget di genggamannya. Cukup dengan mengusap layar gadget, klik dan klik, silaturahmi antar keluarga yang berjauhan pun terpenuhi.

Tidak perlu alergi jika harus membangun dan menjaga silaturahmi antar keluarga melalui online, khususnya di masa pandemi ini. Silaturahmi online lebih fleksibel, kapan pun dan dimana pun dapat dilakukan, tidak sesulit zaman sebelum era teknologi informasi. Dulu, jika hendak berkomunikasi melalui telepon, maka keluarga yang akan memberikan pesan butuh waktu perjalanan yang berjam-jam untuk sampai di warung telepon (wartel), sedangkan pihak keluarga yang menerima pesan harus dipanggil terlebih dahulu oleh pemilik telepon rumah atau pemilik wartel. Begitu sulitnya saat itu. Berbanding terbalik dengan era sekarang, semuanya serba mudah dan cepat.

Silaturahmi online, selain mudah dan murah, juga dijamin aman dari risiko menularkan atau tertular Covid-19. Warga tidak mengeluarkan

biaya untuk membeli tiket, tidak melakukan tes antigen atau swab test sebagai syarat administrasi bepergian, tidak mabuk atau pusing di perjalanan, tidak menunggu antrian pemberangkatan dan kepulangan, tidak repot menyiapkan bekal di perjalanan, tidak khawatir disidak saat hari pertama masuk kerja, dan tidak menjadi sumber ataupun korban penularan Covid-19. Silaturahmi online akan mengobati kerinduan di antara keluarga yang berjauhan, melindungi diri dan keluarga di kampung halaman tetap aman dari Covid-19.

KAPAN RAMPUNGNYA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA?

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya terbaiknya dalam mengendalikan laju Covid-19, salah satunya melalui program vaksinasi Covid-19. Tujuan vaksinasi adalah mempercepat pembentukan sistem imunitas tubuh seseorang agar mampu melawan virus Corona.

Tidak hanya itu, jika seseorang yang telah divaksin dan ternyata masih tertular Covid-19, maka vaksin berfungsi mencegah gejala yang lebih berat dan komplikasi, sehingga peluang untuk sembuh pun lebih besar dan cepat dibandingkan yang belum divaksinasi.

Informasi mengenai pentingnya vaksinasi telah banyak disampaikan baik oleh pemerintah dan diberitakan di berbagai media, petugas kesehatan setempat maupun warga yang telah divaksinasi. Akan tetapi, sangat disesalkan karena masih ada warga yang tidak bersedia divaksinasi dengan berbagai alasan.

Pemerintah tentunya tidak ingin menghabiskan energi yang berlebihan dalam merespons kontroversi vaksinasi di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan makin masifnya program vaksinasi yang dijalankan di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali, fasilitas kesehatan pun sudah disuplai dengan stok vaksin yang disesuaikan dan bahkan melebihi jumlah sasaran di wilayahnya, begitu pula kesiapan petugas vaksinator.

Saat ini masih berlangsung vaksinasi dengan sasaran petugas pelayanan publik dan lansia, sebelumnya didahului vaksinasi kepada petugas kesehatan. Banyak sasaran vaksinasi yang telah menerima vaksin menunjukkan ekspresi kegembiraannya, salah satunya adalah penulis. Mengapa demikian? Ada harapan besar untuk segera mengendalikan Covid-19 di tanah air.

Salah satu bentuk kegembiraan yang ditunjukkan oleh sasaran yang telah divaksinasi adalah bersedia menjadi relawan sumber informasi bagi keluarganya dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Semua hadir memberikan pendidikan mengenai Covid-19 dan vaksinasi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman dan pengalamannya setelah divaksinasi. Misalnya, penulis hadir dengan tulisannya di berbagai media massa dengan tujuan menyebarkan informasi mengenai Covid-19 dan vaksinasi untuk menggugah masyarakat pembaca bersedia menerima vaksinasi.

Sejumlah warga penasaran dan sempat menanyakan kepada penulis, kira-kira kapan rampungnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia? Pada tulisan kali ini, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan hasil analisis penulis dari berbagai sumber data dan informasi mengenai Covid-19 dan vaksinasi.

Pertama, berdasarkan data kemkes.go.id dan Covid19.go.id bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi sebanyak 181.554.465 jiwa atau sekitar 67,2% dari total penduduk Indonesia 270.203.911 jiwa menurut hasil Sensus Penduduk 2020.

Kedua, jumlah sasaran yang telah menerima vaksinasi ke-1 sebanyak 13.284.422 orang dan vaksinasi ke-2 sebanyak 8.583.854 orang, sehingga total vaksin yang telah diberikan kepada sasaran vaksinasi telah mencapai 21.868.276 dosis vaksin.

Ketiga, program vaksinasi sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 yang ditandai dengan pemberian vaksinasi pertama ke Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Jika dihitung, sudah berlangsung setidaknya 126 hari pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Keempat, menurut informasi dari Kementerian Kesehatan RI, kemampuan petugas vaksinator dalam memberikan dosis vaksin kepada sasaran vaksinasi, mampu mencapai 300 ribu dosis vaksin setiap harinya. Sehingga, hanya dibutuhkan total 605 hari untuk memvaksinasi seluruh jumlah sasaran. Hal ini berarti, masih dibutuhkan 479 hari atau sekitar 1,3 tahun lagi. Artinya, program vaksinasi pada sasaran akan berlangsung hingga bulan Agustus 2022.

Kelima, berdasarkan hasil perhitungan penulis, rata-rata jumlah sasaran yang berhasil divaksinasi oleh petugas vaksinator hingga hari ini

masih di angka 173.557 orang per harinya. Hal ini berarti bahwa jumlah sasaran yang divaksinasi setiap harinya masih lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki petugas vaksinator. Sehingga, jika sasaran vaksinasi setiap hari hanya terealisasi di angka tersebut, maka dibutuhkan setidaknya 1.046 hari vaksinasi. Masih dibutuhkan waktu vaksinasi sekitar 920 hari atau 2,5 tahun lagi. Artinya, program vaksinasi akan berlangsung hingga bulan Desember 2023.

Angka-angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sederhana yang dilakukan oleh penulis sendiri. Hasilnya dapat dijadikan referensi dalam menentukan pilihan menyikapi vaksinasi yakni memilih segera atau lambat dalam mendukung rampungnya vaksinasi. Pilihan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi seluruh elemen bangsa.

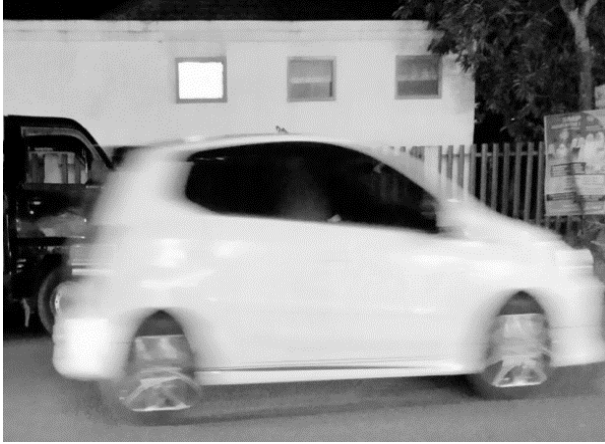
MERENCANAKAN LEBARAN YANG LEBIH BAIK TANPA HARUS MUDIK

Tersisa tiga hari lagi puasa Ramadan tahun 2021 akan berakhir, artinya sebentar lagi seluruh umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, merayakan hari kemenangan atau hari lebaran atau Idul Fitri. Sebagian besar umat Islam pasti merasa gembira dan bahagia.

Hari yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H bagi seluruh umat Islam di dunia termasuk Indonesia, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga kita semua tetap sehat dan masih diberikan umur panjang untuk melaksanakan lagi bulan puasa tahun depan dan seterusnya.

Biasanya hari-hari terakhir Ramadan, menjelang hari lebaran, sebagian masyarakat berbondong-bondong mudik ke kampung halaman untuk merayakannya bersama keluarga. Akan tetapi, tahun ini tradisi mudik tidak seperti biasanya karena adanya kebijakan larangan mudik oleh pemerintah.

Pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi alasan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Tujuannya tidak lain adalah mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Sehingga, keluarga di kampung halaman tetap sehat tanpa ada risiko tertular dari pemudik, sebaliknya pun demikian.



Gambar 7. Situasi arus lalu lintas menjelang hari lebaran

Tujuan larangan mudik lebaran tidak akan tercapai, jika praktik protokol kesehatan tetap saja tidak dipatuhi. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat harus tetap patuh pada protokol kesehatan Covid-19 yakni menjaga jarak aman, sesering mungkin mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan praktik protokol kesehatan lainnya yang direkomendasikan.

Lalu, bagaimana menghadapi lebaran kali ini agar tetap merasakan kegembiraan tanpa harus mudik? Rencanakan lebaran bersama keluarga di rumah saja dan atau keluarga di sekitar tempat tinggal dengan sebaik-baiknya. Begitu pula tetaplah menjalin silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.

Jika memang harus mengunjungi keluarga dan tetangga dalam satu wilayah pada hari lebaran, maka sebaiknya harus menerapkan protokol kesehatan. Pastikan bahwa diri Anda dan keluarga yang akan dikunjungi sama-sama dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa perlengkapan protokol kesehatan senantiasa dibawa dan digunakan.

Begitu juga silaturahmi dengan keluarga yang berada di luar kota dapat dilakukan secara virtual. Manfaatkanlah sejumlah perangkat teknologi yang telah tersedia saat ini. Semua pasti berharap agar pandemi ini segera berakhir, tak terkecuali penulis.

Tidak cukup hanya dengan berharap saja sehingga pandemi ini berakhir, dibutuhkan kerelaan untuk ikut berpartisipasi mencegah penyebarannya baik langsung maupun tidak langsung. Praktik kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang selalu dijaga merupakan upaya nyata dalam mendukung keberhasilan menghentikan pandemi.

Larangan mudik lebaran tidak seharusnya ditanggapi secara berlebihan. Adanya larangan tersebut disebabkan oleh pandemi sebagai penyebab utama. Olehnya itu, seharusnya kita harus patuh protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir, sehingga tradisi mudik lebaran tahun depan tidak dilarang lagi.

LANGKAH MEMPERCEPAT VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Pada tulisan sebelumnya yang berjudul *Kapan Rampungnya Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia?*, penulis telah menuliskan mengenai perhitungan sederhana kira-kira kapan waktu rampungnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Masih dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Penulis telah menuliskan bahwa terdapat dua pilihan waktu untuk merampungkan vaksinasi, yakni sekitar bulan Agustus 2022 atau Desember 2023. Sekali lagi bahwa pilihan tersebut sangat tergantung pada partisipasi semua elemen bangsa ini.

Telah dijelaskan pula pada tulisan tersebut bahwa ternyata jumlah sasaran vaksinasi yang berhasil divaksinasi setiap harinya masih lebih rendah dibandingkan kemampuan petugas vaksinator. Jika kondisi ini tetap berlangsung, maka akan semakin memperlambat waktu untuk merampungkan vaksinasi pada sasaran vaksinasi di Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana upaya mempercepat vaksinasi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebaiknya diperlukan informasi lebih dulu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan jumlah sasaran vaksinasi masih jauh lebih rendah dibandingkan kemampuan petugas vaksinator yang dimiliki saat ini.

Pertama, apakah disebabkan karena stok vaksin yang terbatas? Penulis dapat mengatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi faktor penyebabnya karena menurut informasi terakhir dari Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam tweetnya pada tanggal 8 Mei 2021 dikatakan bahwa secara keseluruhan Indonesia telah mengamankan 75,91 juta dosis vaksin. Artinya, stok vaksin masih relatif aman dalam melayani jumlah sasaran prioritas kedua yakni sekitar 38,5 juta orang.

Kedua, apakah sasaran belum memenuhi syarat untuk divaksinasi pada saat hari pelaksanaan vaksinasi? Bisa saja ini menjadi penyebabnya. Seseorang yang akan divaksinasi harus memenuhi sejumlah persyaratan baik kondisi kesehatan pada hari pelaksanaan vaksinasi maupun persyaratan lainnya. Tidak sedikit jumlah sasaran yang telah dijadwalkan untuk divaksinasi dan akhirnya gagal karena belum memenuhi syarat vaksinasi.

Ketiga, apakah sasaran vaksinasi menolak untuk divaksinasi? Faktor ini juga menjadi penyebab masih rendahnya jumlah sasaran yang berhasil divaksinasi setiap harinya dibandingkan kemampuan petugas vaksinator. Berbagai hasil riset termasuk penelusuran yang dilakukan oleh penulis sendiri menunjukkan bahwa masih banyak sasaran vaksinasi yang menolak untuk divaksinasi dengan bermacam alasan.

Berdasarkan faktor penyebab rendahnya jumlah sasaran yang berhasil divaksinasi dibandingkan kemampuan petugas vaksinator tersebut, maka penulis memberikan beberapa alternatif solusi dalam mempercepat vaksinasi sebagai berikut:

Pertama, meskipun ketersediaan stok vaksin secara nasional masih cukup dibandingkan dengan jumlah sasaran prioritas vaksinasi yang saat ini masih berlangsung, tetapi sebaiknya pemerintah harus tetap memaksimalkan ketersediaan stok vaksin, karena setelah sasaran prioritas vaksinasi yang sekarang, akan dilanjutkan dengan sasaran vaksinasi pada masyarakat umum yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sasaran vaksinasi sebelumnya.

Kedua, jika penyebabnya adalah kurangnya jumlah sasaran yang memenuhi syarat memperoleh vaksinasi saat hari pelaksanaan pemberian vaksin, maka sebaiknya pemerintah setempat segera koordinasi dengan pihak penyelenggara vaksinasi seperti puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan lainnya untuk menggantikan sasaran tersebut dengan sasaran vaksinasi baru yang memenuhi persyaratan.

Sasaran vaksinasi yang tertunda memperoleh vaksin karena belum memenuhi syarat, mereka tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh vaksin jika telah memenuhi syarat. Hal ini penting dilakukan agar program vaksinasi tetap berjalan dan menjangkau sedini mungkin sasaran vaksinasi.

Ketiga, jika penyebabnya adalah sasaran vaksinasi tidak bersedia menerima vaksin padahal memenuhi syarat pada hari pelaksanaan pemberian vaksin, maka solusi pada bagian kedua juga dapat diterapkan yakni penyelenggara vaksinasi dapat menggantikannya dengan sasaran baru yang bersedia divaksinasi dan memenuhi syarat.

Tidak sedikit masyarakat umum yang telah bersedia divaksinasi. Mereka terkendala memperoleh vaksinasi karena jadwal vaksin bagi sasaran masyarakat umum belum dimulai. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat yang telah bersedia divaksinasi dapat dipertimbangkan untuk diberi kesempatan vaksinasi lebih awal. Bagi sasaran yang tidak bersedia divaksinasi, selain memaksimalkan sosialisasi secara masif dan kontinyu, juga dapat dilakukan pendekatan lain.

APAKAH MUDIK LEBARAN SUDAH DIPERBOLEHKAN TAHUN DEPAN?

Kesedihan yang sangat mendalam pasti dirasakan oleh saudara-saudara kita para calon pemudik yang tidak jadi mudik lebaran karena adanya larangan. Teramat sedih. Calon pemudik sejak lama mempersiapkan rencana mudiknya. Tetapi nyatanya, rencana tidak seindah yang diinginkan.

Jika seseorang pernah berencana untuk merencanakan suatu acara atau tempat tertentu yang didambakannya, namun gagal karena sesuatu hal, maka pasti akan merasakan kesedihan. Tetapi kesedihan yang dirasakan kala itu, belum dapat disamakan dengan kesedihan saat bertemu dengan orangtua dan keluarga yang mengatakan tiba-tiba harus batal.

Setidaknya sudah dua tahun berturut-turut para calon pemudik merencanakan mudik lebaran, tetapi hasilnya masih tetap sama tidak gagal. Para pemudik harus merelakan kesempatannya untuk berkumpul dan berkumpul bersama keluarganya di kampung halaman pada hari yang penuh kebahagiaan, hari lebaran Idul Fitri.

Apakah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan keluarga di momen lebaran berikutnya? Hanya Tuhan yang Maha Mengetahui. Pertanyaan inilah yang biasanya menghantui para calon pemudik sehingga ingin mudik meski harus menerjang badai. Tidak sedikit calon pemudik tahun lalu yang sudah tidak merencanakan lagi mudik pada tahun ini karena keluarga yang ingin ditemui kini telah tiada.

Apakah benar jika pemerintah telah merampas kesempatan para calon pemudik untuk bertemu keluarganya? Tentu hal itu tidak benar. Pemerintah hanya ingin bagi yang lebih baik bagi seluruh warga negara

di masa pandemi, melindungi warganya dari penularan Covid-19 termasuk mereka yang tidak mudik dan keluarga yang akan dikunjungi oleh para pemudik.

Jika mudik lebaran dilarang, maka potensi risiko tertular atau menularkan Covid-19 di antara keluarga tidak terjadi. Malah, jika mudik lebaran tidak dilarang, maka potensi risiko untuk tertular atau pun menularkan di antara keluarga yang lebih tinggi.

Pasalnya, mudik lebaran identik dengan silaturahmi atau saling mengunjungi antar keluarga. Sudah menjadi tradisi masyarakat, jika salah satu keluarga baru tiba dari daerah lain, keluarga akan berbondong-bondong mengunjunginya atau sebaliknya, pemudik yang akan mengunjungi segenap keluarganya.

Jika para calon pemudik membatalkan mudiknya, maka tradisi kunjungan tidak akan terjadi sehingga meniadakan kontak langsung. Kontak otomatis langsung, maka akan terjadi risiko penularan Covid-19 karena Covid-19 tidak akan menyebar atau menyebar jika seseorang dengan status konfirmasi tidak pergi kemana-mana.

Lalu, bagaimana sebaiknya sikap sikap warga yang tidak mudik bagi warga yang membatalkan mudiknya? Menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan menghormati baik kepada calon pemudik yang membatalkan mudik atau warga yang tidak sama sekali merencanakan mudik. Di tengah pandemi, sebaiknya semua harus mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Kepatuhan protokol kesehatan yang ditunjukkan oleh semua warga dapat membantu kita dalam memaksimalkan penyebaran program Covid-19. Selain itu, perlu keikutsertaan semua warga dalam menerima vaksinasi yang sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia.

Jika semua warga negara menunjukkan sikapnya baik pada protokol kesehatan maupun kesediaan menerima vaksinasi, maka akan melancarkan rencana mudik tahun depan. Semua calon pemudik tidak akan gagal lagi untuk mudik lebaran. Akan tetapi, jika masih menunjukkan ketidakpatuhan protokol dan tidak bersedia divaksinasi, maka sepertinya rencana mudik tahun depan harus direncanakan lagi di tahun berikutnya.

INDONESIA BISA MENGAMBIL HIKMAH DI BALIK KASUS COVID-19 DI INDIA

Beberapa hari terakhir banyak media massa yang menyajikan berita tentang perilaku unik yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat India di negara bagian Gujarat, yakni mengolesi tubuh mereka dengan kotoran dan urin sapi. Tindakan ini mereka yakini mampu meningkatkan imunitas tubuh dalam menangkal dan bahkan menyembuhkan Covid-19.

Meski telah diperingatkan oleh para dokter dan ilmuan setempat bahwa tindakan tersebut dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan yang ditularkan dari hewan ke manusia, namun praktik tersebut masih saja dilakoninya. Padahal, hingga sekarang belum ditemukan bukti secara ilmiah yang merekomendasikan kotoran dan urin sapi dapat dijadikan penangkal Covid-19.



Gambar 8. Seorang warga India yang mengolesi tubuhnya dengan kotoran sapi. Foto: Amit Dave/Reuters

Memang, pada masyarakat India, kotoran sapi diyakini bermanfaat untuk kesehatan dan bahkan mereka menggunakannya untuk melakukan sebuah tradisi unik. Akan tetapi, praktik unik ini makin massif dilakukan sejak kasus Covid-19 menjadi sorotan dunia. Kini, seolah kotoran dan urin sapi menjadi primadona pada sebagian masyarakat Gujarat, India. Mungkin ke depan jika stok kotoran dan urin sapi di negaranya sudah menipis, mereka akan mengimpor kotoran dan urin sapi dari negara lain termasuk dari Indonesia.

Belakangan ini banyak informasi di berbagai media yang mengulas bahwa kasus Covid-19 di India meningkat tajam. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, pertemuan massal, rendahnya tingkat vaksinasi, dan adanya varian baru virus Corona yang lebih menular dibandingkan "Covid-19 konvensional" menyebabkan kasus Covid-19 di India melonjak tidak terkendali.

Praktik yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Gujarat, India belum terbukti secara ilmiah bahwa mampu menurunkan atau mencegah penyebaran Covid-19. Justru praktik ini dinilai sebagai salah satu sumber penyebaran Covid-19 karena menyebabkan kerumunan orang banyak. Jika praktik ini terus dilakukan dengan alasan kotoran dan urin sapi dapat menjadi alternatif untuk mencegah Covid-19, maka menjadi pertanda buruk bagi India dalam mengendalikan pandemi ini.

Saat sebagian masyarakat India diberitakan memilih kotoran dan urin sapi sebagai alternatif menangkal Covid-19, justru di waktu bersamaan pula sebagian lainnya berlomba-lomba untuk memperoleh tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan obat-obatan, sehingga menyebabkan banyak di antaranya meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang baik.

Praktik yang dipilih oleh sebagian masyarakat di India merupakan tindakan yang tidak direkomendasikan oleh WHO karena belum ada pembuktian secara *science*. Fenomena unik yang dipertontonkan sebagian masyarakat di India dapat disalahartikan dan diikuti oleh masyarakat di negara lain yang menyaksikannya.

Olehnya itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa praktik tersebut keliru dan tidak berdasar. Kotoran dan urin sapi memang mudah diperoleh

di Indonesia, tetapi tidak berarti bahwa masyarakat Indonesia telah kehilangan nalar dalam memilih alternatif penangkal Covid-19 yang tidak direkomendasikan.

Kita semua tentu berharap bahwa kasus Covid-19 yang terjadi di India saat ini yang merupakan akibat adanya kerumunan massal, tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menghimbau sejak awal bahwa salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 adalah menghindari kerumunan orang dalam jumlah yang banyak.

Jika praktik berkerumun masih saja dipertontonkan oleh masyarakat dan tidak dicegah, maka tidak mustahil bahwa kejadian di India juga dapat menimpa Indonesia. Oleh karena itu, sikap menahan diri atau menghilangkan kebiasaan berkumpul di masa pandemi adalah suatu sikap bijaksana untuk mencegah Indonesia tidak seperti yang terjadi di India.

Selain menghindari kerumunan massal, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan protokol kesehatan Covid-19 lainnya yang harus dipatuhi seperti menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, sesering mungkin mencuci tangan, dan tetap memakai masker jika berada di luar rumah.

Mari bahu-membahu mengatasi pandemi. Jika kita menginginkan pandemi segera berakhir dan menghilang dari Indonesia, maka sudah saatnya menahan diri dan menghilangkan kebiasaan yang bertentangan dengan protokol kesehatan. Selain itu, jangan sampai lupa untuk hadir menerima vaksinasi jika waktunya sudah dijadwalkan.

PENTINGNYA MENANAMKAN KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN PADA ANAK SEJAK DINI

Sejak Covid-19 dinyatakan ada di Indonesia hingga sekarang, telah berlangsung kurang lebih 14 bulan. Selama itu pula, masyarakat Indonesia sudah merasakan hidup dalam situasi serba terbatas dan dibatasi. Bahkan, kemunculannya sudah sangat meresahkan dan membahayakan hidup seseorang.

Ibarat hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar. Meskipun bisa terbang, tetapi tetap terbatas, jangkauannya hanya seluas sangkar burung saja. Begitu pula yang dirasakan masyarakat Indonesia, ketika diberikan ruang dan waktu untuk beraktivitas di luar rumah, tetapi tetap masih terbatas dan dibatasi.

Masyarakat bisa saja keluar rumah, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kebebasan berinteraksi dengan sesama masyarakat pun dibatasi. Padahal, masyarakat Indonesia sangat senang berkumpul dan bepergian, kini tidak seperti biasanya sebelum adanya Covid-19.

Kebiasaan berkumpul di kalangan masyarakat Indonesia, kini dibatasi dan bahkan dilarang saat pandemi. Akibatnya, banyak masyarakat yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun telah ada himbauan pembatasan dan kebijakan protokol kesehatan, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengindahkannya.

Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan pandemi dan bahkan semakin tertinggal dibandingkan negara lain. Belum lagi kehadiran varian baru Covid-19 yang lebih cepat menyebar dibandingkan

Covid-19 konvensional, mestinya masyarakat harus lebih patuh lagi dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah membuktikan keseriusannya dalam memerangi pandemi dengan berbagai aksi. Selain meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan, juga saat ini masih berlangsung pembatasan akses keluar dan masuknya pemudik lebaran di sejumlah perbatasan antardaerah. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Indonesia juga telah menggalakkan program vaksinasi sejak 13 Januari 2021 hingga sekarang.

Apakah keseriusan pemerintah melalui sejumlah aksi, sudah cukup dalam mengendalikan Covid-19 di Indonesia? Tentu tidak cukup. Masih dibutuhkan partisipasi semua elemen bangsa dalam mengatasi pandemi, tak terkecuali masyarakat kalangan remaja, dewasa, lansia, termasuk anak-anak.



Gambar 9. Anak-anak yang senantiasa patuh dalam memakai masker

Anak-anak merupakan salah satu kelompok usia yang juga rentan terhadap penularan Covid-19. Mereka selalu keluar rumah untuk berkumpul dan bermain bersama dengan teman-temannya. Jika anak tersebut luput dari pengawasan orangtuanya dalam menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah, maka tidak menutup kemungkinan mereka bisa saja terpapar Covid-19 yang disebabkan oleh teman sepermainannya.

Oleh karena itu, orangtua perlu menanamkan perilaku kepatuhan protokol kesehatan kepada anaknya sejak dini. Selain menjaga anak dari risiko penularan Covid-19 yang disebabkan oleh teman bermain di lingkungannya, juga membiasakan anak berperilaku patuh protokol kesehatan saat berlangsungnya pembelajaran tatap muka di sekolah.

DONOR DARAH DI MASA PANDEMI

Salah seorang penulis merupakan pendonor aktif secara sukarela di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Kota Samarinda. Hingga donor terakhir kemarin (19/4/2021), setidaknya sudah lebih dari 30 kali melakukan donor darah di PMI Kota Samarinda. Sejak pandemi hingga sekarang, penulis telah donor darah sekitar 5 kali di UDD PMI Kota Samarinda.

Selama pandemi Covid-19, PMI Kota Samarinda tetap memberikan pelayanan donor darah bagi warga pendonor yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Dalam pelaksanaannya, PMI komitmen dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan, baik berupa penyediaan sejumlah fasilitas pendukung protokol maupun kesiapan pegawai yang bertugas memberikan pelayanan.

Ketersediaan sejumlah fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan antara lain dua buah wastafel di dekat pintu masuk ruang pelayanan donor darah, kursi tunggu telah diatur berjarak, di beberapa tempat terdapat hand sanitizer, petugas dilengkapi dengan masker dan pelindung muka. Tidak hanya itu, pendonor dan bahkan keluarga pasien yang berkunjung ke PMI juga semuanya mematuhi protokol kesehatan.

Kebutuhan darah dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit selalu ada setiap hari dan bahkan setiap saat, sehingga pihak PMI harus memastikan pasokan darah selalu tersedia cukup untuk menunjang kelancaran berbagai tindakan medis yang dilakukan di setiap rumah sakit.

Sebelum munculnya pandemi, biasanya beberapa instansi pemerintah dan swasta bekerjasama dengan PMI untuk melaksanakan aksi donor darah secara rutin. Pelaksanaan donor darahnya pun dilakukan di tempat penyelenggara kegiatan donor. Akan tetapi, sejak pandemi

kegiatan tersebut sangat jarang dilakukan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak.

Akibatnya, pasokan darah di PMI yang bersumber dari aksi donor darah bersama dengan pihak pemerintah dan swasta pun otomatis berkurang. Ditambah lagi, sejak pandemi jumlah pendonor yang berkunjung ke PMI juga menurun dibandingkan sebelum adanya pandemi. Padahal kebutuhan akan darah tetap ada dan tidak bisa ditunda.

Menurunnya kunjungan pendonor untuk datang mendonorkan darahnya di UDD PMI karena berbagai faktor antara lain kurangnya informasi mengenai pelayanan donor darah selama pandemi. Penulis seringkali mendapat pertanyaan dari warga seusia donor, apakah PMI tetap melayani donor darah saat pandemi?, apakah pendonor harus mengikuti sejumlah tes sebelum donor?, dan pertanyaan lainnya.

Selain keterbatasan informasi mengenai layanan donor darah, juga adanya kekhawatiran warga terhadap penularan Covid-19 yang menyebabkan banyak di antaranya menunda untuk datang mendonorkan darahnya di PMI. Lalu, bagaimana upaya mendorong pendonor agar tetap bersedia mendonorkan darahnya di masa pandemi?

Pihak UDD PMI agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada warga mengenai pelayanan donor darah selama pandemi melalui media massa. Tetap bekerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam menyelenggarakan aksi donor darah dengan sejumlah pembatasan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. PMI secara aktif mengingatkan waktu donor darah bagi pendonor yang telah memenuhi syarat.

Selain itu, pendonor sukarela yang rutin mendonorkan darahnya selama pandemi, agar bersedia membantu pihak PMI dalam menyampaikan informasi kepada warga bahwa kegiatan donor darah selama pandemi tetap berjalan seperti biasanya, tanpa tes antigen dan swab serta aman dari penyebaran Covid-19.

Penyebaran informasi dan mengaktifkan kembali aksi donor darah bersama di berbagai tempat akan membantu PMI dalam menyediakan pasokan darah tetap terpenuhi. Warga tidak perlu takut untuk datang langsung donor darah ke UDD PMI karena di tempat tersebut aman dari penularan Covid-19. Begitu pula saat ada aksi donor darah bersama,

selain dilakukan pembatasan jumlah pendonor juga senantiasa diterapkan protokol kesehatan.

MENAKAR KEAMPUHAN SIKAP AIO MASYARAKAT DALAM MENGENDALIKAN COVID-19

Sudah setahun lebih Covid-19 menyerang Indonesia dan belum diketahui secara pasti kapan waktunya menyerah. Seluruh aspek kehidupan terdampak karena kemunculan Covid-19. Situasi perekonomian yang tidak stabil sehingga banyak sektor usaha mengalami kebangkrutan dan berakhir tragis bagi pekerjanya karena kehilangan penghasilan. Dunia pendidikan pun tidak luput dari ganasnya Covid-19, dimana orangtua harus ekstra sabar mendidik anaknya di rumah karena sistem pembelajaran juga berubah dari tatap muka menjadi daring.

Begitu pula kehidupan sosial masyarakat dari harmonis menjadi kurang harmonis, dan bahkan budaya Indonesia yang dikenal sejak lama oleh dunia dengan semangat gotong-royongnya pun semakin menghilang karena Covid-19. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat akan Covid-19 dan vaksinasinya juga masih menyisakan setumpuk pekerjaan rumah. Ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang berdampak langsung dan tidak langsung pada ketahanan ekonomi di level keluarga, kehidupan sosial masyarakat yang semakin hari kian menghilang, dan ketidakpercayaan masyarakat dengan pandemi ini dapat memicu konflik sosial di masyarakat jika tidak dikelola secara sungguh-sungguh dan bijaksana.

Kompleksitas permasalahan Covid-19 yang dihadapi Indonesia merupakan ujian berat bagi seluruh komponen bangsa khususnya pemerintah. Tentu Pemerintah Indonesia tidak diam dan terus memaksimalkan potensi yang dimiliki negeri ini dalam menyusun strategi

yang mumpuni untuk mengusir Covid-19 dari tanah air. Pertama, himbuan penerapan protokol kesehatan Covid-19 telah digaungkan sejak awal pandemi. Sayangnya, masih ditemukan sebagian masyarakat yang tidak mengindahkannya, akibatnya gelombang Covid-19 tetap menyapu bersih hingga ke pelosok daerah dan bahkan menelan korban meninggal dunia yang tidak sedikit.

Kedua, pemerintah menyempurnakan himbuan protokol kesehatan dengan menetapkan kebijakan PSBB. Hasilnya tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Ketiga, disusul program vaksinasi yang bertujuan untuk mencapai kekebalan komunitas (*herd immunity*) dan dinilai sebagai upaya pamungkas memerangi Covid-19. Dimulai sejak 13 Januari 2021, program vaksinasi masih berlangsung hingga sekarang, akan tetapi tanda-tanda kemenangan melawan Covid-19 belum dapat dipastikan karena lagi dan lagi menuai kontroversi di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menolak divaksinasi dengan berbagai alasan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap responsif terhadap perubahan dan perkembangan Covid-19 di tanah air. Buktinya, pemerintah telah hadir dengan kekuatan maksimal dilengkapi amunisi terbaiknya seperti kesiapan SDM yang handal dan profesional, fasilitas pendukung yang memadai, ketersediaan teknologi mutakhir dan modern serta support finansial yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Kesemuanya itu dilakukan oleh pemerintah secara terencana, terukur, dan dikelola dengan baik untuk mencapai sebuah kemenangan atas Covid-19 dan sekaligus upaya pemulihan ekonomi di saat dan setelah pandemi.

Pertanyaannya, mengapa Covid-19 masih belum juga berhenti dan hilang dari tanah air? Strategi pemerintah dalam merespon Covid-19 belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat seharusnya hadir sebagai subjek pengendali strategi dalam menghentikan laju Covid-19, bukan sebagai objek strategi penerapan pengendalian Covid-19. Dibutuhkan masyarakat yang memiliki sikap adaptif, inovatif, dan open minded (AIO) dalam mendukung peranannya sebagai subjek pengendalian Covid-19.

Penulis akan menjelaskan sikap tersebut yang seharusnya dimiliki masyarakat dan menganalisis keampuannya dalam mengendalikan

Covid-19. Pemerintah tentu kurang berdaya menghadapi Covid-19 jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa. Masyarakat seharusnya mampu mempraktikkan sikap tersebut sehingga Covid-19 berhasil terusir dari negeri yang kita cintai bersama. Pertama, masyarakat harus adaptif dengan teknologi informasi saat ini sehingga tidak mudah terprovokasi berita bohong (*hoax*) mengenai Covid-19 dan vaksinasi.

Kedua, masyarakat harus inovatif dalam merespons Covid-19 di lingkungannya. Masyarakat bersama pemerintah daerah harus bahu-membahu menghadirkan inovasi untuk mencegah penularan Covid-19 dan melakukan mitigasi seperti program Jogo Tonggo yang telah dipraktikkan di Jawa Tengah. Semangat kekeluargaan sesuai nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dan ditingkatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, masyarakat harus berpikir secara terbuka (*open minded*), tidak kaku terhadap perubahan di lingkungannya sebagaimana ciri masyarakat dewasa dan modern.

Bahkan, sikap masyarakat tersebut tidak hanya dapat diimplementasikan saat berperang melawan Covid-19, tetapi juga menjadi spirit untuk merespons setiap perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca pandemi. Perubahan itu penting tanpa harus mengubah kebiasaan yang masih penting. Semangat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Pancasila jangan sampai hilang meski pandemi telah berlalu.

PENTINGNYA PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KHUSUS NARKOBA DAN HIV/AIDS DI PERGURUAN TINGGI

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku *focal point* bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang.

Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27 persen di Indonesia. Hal ini tentu menjadi salah satu masalah sosial dan kesehatan yang sangat mengkhawatirkan sekaligus menjadi tantangan dalam menciptakan generasi muda milenial yang sehat dan produktif.

Beberapa pihak yang jadi perhatian dalam mencegah penyebaran konsumsi narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa yakni lingkungan keluarga, lingkungan tempat belajar, dan lingkungan masyarakat. Komitmen pemerintah melalui BNN mengharapkan keterlibatan dan keseriusan pihak kampus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan mahasiswa. Beberapa tahun terakhir, proses penerimaan mahasiswa baru telah dilakukan pemeriksaan urine

untuk memastikan bahwa calon mahasiswa baru tidak terpapar dengan narkoba. Pihak universitas bekerja sama dengan BNN dan rumah sakit pemerintah yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan urine bagi calon mahasiswa baru tersebut.

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa. Namun, upaya pemeriksaan lanjutan belum dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Padahal, pemeriksaan kesehatan dan urine secara berkala diharapkan sebagai upaya kontrol terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan mahasiswa. Upaya promosi kesehatan harus terus digalakkan agar mahasiswa dan civitas akademik di lingkungan universitas semakin memahami dan menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan baik diri pribadi, keluarga, dan lingkungan sosial. Begitu pula sosialisasi tentang HIV dan AIDS mestinya terus dilakukan dalam upaya mencegah peningkatan jumlah penderita baru.

Komitmen perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS baik di kalangan remaja dan masyarakat umum tentu tidak diragukan lagi karena dalam berbagai kesempatan perguruan tinggi ikut terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Partisipasi aktif perguruan tinggi dalam memerangi narkoba dan HIV/AIDS akan lebih ditingkatkan dengan adanya unit layanan khusus (ULK) atau istilah lainnya yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS.

Berbagai tujuan yang dapat dicapai dengan adanya ULK narkoba dan HIV/AIDS di perguruan tinggi antara lain menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta meminimalkan risiko penularan HIV dan AIDS pada kalangan mahasiswa dan civitas akademik, mendukung program nasional pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja, dan menyediakan generasi muda penerus pembangunan bangsa dan negara yang sehat dan produktif tanpa narkoba dan bebas dari penyakit penyertanya.

Begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkoba serta pencegahan penyebaran HIV/AIDS di lingkungan perguruan tinggi, maka

pembentukan ULK atau unit lain yang fokus pada masalah narkoba dan HIV/AIDS di perguruan tinggi merupakan suatu upaya dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas narkoba dan HIV/AIDS. Keberhasilan perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan narkoba dan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola perguruan tinggi, akan tetapi dibutuhkan partisipasi semua komponen civitas akademik. Selain itu, dibutuhkan kerjasama lintas program dan instansi dengan melibatkan multi disiplin dalam memerangi narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS di lingkungan pendidikan.

RELAWAN SAMPAH “BUKAN” SAMPAH

Umumnya mereka tidak minta gaji karena statusnya bukanlah seorang karyawan. Tidak juga menagih uang karena paham bukanlah *debt collector*. Tidak pernah terdengar keluhan padahal terkadang bekerja dari siang hingga larut malam. Tetap bersemangat dalam menjalani rutinitasnya. Berselang sehari kehadirannya pasti dinanti dengan ciri khas teriaknya "sampaaaaaah". Itulah rutinitas keseharian seorang "relawan pengangkut sampah" yang tetap setia mengangkut sampah hingga gang sempit.

Suatu hari penulis sengaja sempatkan waktu untuk menunggunya di teras rumah. Menunggunya bukan tanpa alasan, berharap menyelami sedikit informasi motivasi melakoni rutinitasnya. Dia pun datang lengkap dengan gerobak kayu di belakangnya. Seperti biasa, dari kejauhan sudah berteriak "sampaaaaaah". Semua jenis sampah sudah siap di tangan, saya pun lalu menyapa dan menaruh sampah di gerobaknya. "Pak, ini ada sedikit rezeki dari kami" kata penulis dan tampak rasa senang di wajahnya yang sudah mulai mengeriput. "Terima kasih mas, sehat terus sekeluarga" jawabnya singkat.



Gambar 10. Pengangkut sampah dilengkapi gerobak sampah

Kesempatan ini pun tidak disia-siakan penulis untuk bertanya lebih lanjut. Sambil mendekat dan memegang gerobaknya, penulis langsung melancarkan sejumlah pertanyaan. "Sejak kapan Bapak melakukan ini?, Apakah ada profesi lain?, Bagaimana dukungan dari anak-anak dan istri?, Apa motivasi melakukannya?, Apakah ada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan ini?, Apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya?, Kira-kira sampai kapan Bapak akan melakoninya?."

Ternyata pertanyaan penulis yang banyak itu membuatnya tersenyum lalu tertawa lepas sambil sesekali menyeka keringat. Tampak tidak ada beban dari wajahnya. Sangat bersahabat dan bahkan beliau pun begitu tenang mendengar pertanyaan dari penulis. Bapak "Mo" nama panggilannya yang kini berusia sekitar 55 tahun.

Bapak Mo pun memulai bercerita. "Sekitar lebih 10 tahun yang lalu mulai menjalani ini". Itulah kalimat pertama yang disampaikannya. "Kegiatan hanya ini dan tidak ada yang lain. Istri dan anak-anak selalu mendukung. Awalnya suka kumpulkan sampah plastik untuk dijual lagi tapi lama-lama jadi senang masuk gang mengambil sampah depan rumah orang sekitar sini. Ternyata, ada warga yang kepingin dibantu sampahnya

dibuang dan memberikan uang. Kalau dibilang cukup, disyukuri mas rezeki yang ada. Entah sampai kapan menjalaninya tapi selama sehat, Insya Allah akan tetap seperti ini". Setelah bercerita hal-hal lainnya, beliau lalu pamit dan melanjutkan rutinitasnya.

Hasil wawancara singkat dan sifatnya dadakan dengan Bapak Mo menyisakan sejumlah pertanyaan di benak penulis. Terdapat banyak relawan pengangkut sampah yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana regulasi di daerah tentang pengelolaan sampah?, Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membuang sampah?, Apakah keberadaan relawan pengangkut sampah masih diperlukan?, Bagaimana kepedulian pemerintah setempat terhadap keberadaan mereka?

Fenomena sampah rumah tangga bukan hanya terjadi saat ini. Sejak dahulu dan hingga kini. Bahkan tidak sedikit daerah di Indonesia terdampak banjir karena tumpukan sampah yang tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Pemerintah daerah tentunya tidak diam melihat permasalahan sampah. Terbukti, Pemerintah Kota Samarinda tempat domisili penulis bahkan telah mengeluarkan sejumlah regulasi berkaitan masalah sampah antara lain Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Secara tegas termuat dalam Perda tersebut bahwa adanya sanksi bagi warga yang tidak membuang sampah pada pukul 18.00-06.00 WITA berupa denda Rp. 50.000.000,- atau kurungan paling lama tiga bulan. Sejak diberlakukannya, telah banyak warga yang diberikan sanksi dan bahkan tidak sedikit kasusnya berujung di pengadilan. Padahal kampanye dan sosialisasi pelarangan membuang sampah sembarangan masih gencar dilakukan hingga saat ini, akan tetapi praktik pelanggaran oleh sejumlah warga masih saja ditemukan. Apakah sanksi masih dianggap tidak memberatkan bagi mereka yang melanggar atau kesadaran warga masih rendah dalam menangani sampahnya sendiri?.

Jika praktik pelanggaran Perda ini disebabkan karena dianggap masih kurang "menggigit", maka pemerintah daerah beserta pihak terkait perlu melakukan *review* kebijakan misalnya dengan tambahan sanksi yang memberatkan bagi pelanggar. Akan tetapi jika praktik

ketidapatuhan warga disebabkan kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah di rumahnya maka kehadiran relawan pengangkut sampah masih tetap diperlukan. Bukan tanpa alasan kehadiran mereka diperlukan. Faktanya, mereka secara rutin 3-4 kali seminggu mengangkut sampah di setiap rumah dalam gang sempit. Sampah-sampah yang dimuat dalam gerobaknya lalu dibuang ke TPS terdekat dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil dari instansi pemerintah ke TPA sampah.

Beberapa daerah di Indonesia melalui dinas teknis yang membidangi masalah lingkungan hidup dan kebersihan wilayah telah menyediakan sejumlah anggaran operasional pengelolaan sampah seperti pengadaan gerobak sampah di tingkat RT atau desa/kelurahan. Pemerintah Kota Samarinda sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan gerobak sampah di sejumlah lingkungan RT. Ketersediaan gerobak sampah di tingkat RT atau desa/kelurahan hanya "benda pajangan" jika tidak ada petugas sampah yang membawanya dari lingkungan RT ke TPS.

Tidak cukup hanya dengan berharap akan hadir sosok relawan pengangkut sampah seperti Bapak Mo yang tidak mengharapkan imbalan dari jasanya. Relawan pengangkut sampah juga memiliki keluarga dengan berbagai kebutuhannya. Pemerintah daerah perlu hadir demi peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Sudah selayaknya mereka diperlakukan sama seperti petugas pengangkut sampah dari TPS ke TPA dan petugas kebersihan wilayah. Petugas-petugas tersebut telah memperoleh honor setiap bulannya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait. Apakah hal ini sulit berlaku bagi relawan pengangkut sampah? Jawabannya, tentu tidak sulit.

Komitmen kebijakan dan kepedulian serta penghargaan dari pemerintah daerah dapat menjadi harapan besar bagi peningkatan ekonomi para relawan. Penghasilannya tidak lagi ditentukan uluran tangan dermawan tetapi mereka juga dapat menikmati penghasilan pasti yang menanti setiap bulannya. Kepedulian yang amat besar dalam penanganan sampah rumah tangga patut diapresiasi. Relawan pengangkut sampah tidak mungkin diperlakukan layaknya menangani sampah yang memang harus dihilangkan karena dinilai mencemari lingkungan dan bahkan dianggap tidak berharga. Relawan pengangkut sampah justru hadir sebagai sosok peduli dalam menciptakan lingkungan bebas sampah.

MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK DI PELOSOK DESA

Masih ingat kasus yang menjerat Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau lebih dikenal publik dengan nama Gayus Tambunan? Kasus ini ramai diperbincangkan sekitar tahun 2010-2011. Kasus korupsi yang menghebohkan seantero negeri. Tidak tanggung-tanggung, kerugian negara mencapai milyaran rupiah. Hingga akhirnya divonis bersalah dan dihukum penjara. Bahkan, tidak sedikit petinggi lembaga negara ikut terseret dalam kasus Gayus tersebut.

Rabu, 14/4/2021 sekitar pukul 13.50 WITA, salah seorang penulis membantu melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik orangtua di kampung halaman. Setidaknya 4 nomor objek pajak (NOP) dengan nama wajib pajak (WP) yang berbeda-beda. Biasanya pembayaran PBB dilakukannya sendiri setiap tahun. Proses pembayarannya pun begitu mudah. Saat kepala kampung/dusun/RT mengantarkan slip pembayaran PBB tahun berjalan, hari itu juga atau berselang beberapa hari warga melunasinya.

Sehari sebelumnya (13/4/2021), orangtua penulis bercerita tentang banyaknya warga di kampung yang ke ibu kota kabupaten untuk membayar PBB. Terdapat keanehan, sejumlah WP mengaku kaget karena mereka dikenakan denda keterlambatan pembayaran PBB. Dendanya pun tidak sedikit. Jumlah denda hampir sama dengan jumlah pembayaran PBB yang seharusnya dibayarkan setiap tahun. Padahal, menurut mereka rutin membayar PBB.

Sebagai warga yang taat pajak, orangtua sempat menanyakan kepada kepala kampung/dusun mengenai slip pembayaran PBB, tetapi hasilnya nihil. Kepala kampung menyampaikan bahwa banyak WP yang

tidak mendapatkan slip PBB. Metode pembayarannya pun berubah. Setiap WP diminta membayar PBB di ibu kota kabupaten. Butuh waktu sekitar 120 menit perjalanan menuju ibu kota.

Selain itu, petugas pajak yang di ibu kota tidak mau tahu apabila ada keluhan WP. Misalnya, WP melaporkan bahwa telah membayar PBB tahun-tahun sebelumnya dan dilengkapi bukti fisik pelunasan PBB. Akan tetapi, petugas hanya tetap mengacu pada sistem pelaporan PBB yang di hadapannya. Jika di sistem terlihat bahwa WP belum bayar PBB beserta denda, maka WP harus membayarnya. Ini juga menimbulkan kekhawatiran baru bagi WP. Mereka dihantui pembayaran PBB dan dendanya yang telah menumpuk.

Berdasarkan informasi itulah sehingga memunculkan sejumlah pertanyaan. Ditambah lagi, pengakuan sejumlah WP bahwa mereka setiap tahunnya taat membayar PBB. Ada bukti pelunasannya. Bukti itu diserahkan oleh kepala kampung ke WP sesaat setelah menyerahkan sejumlah uang sesuai nominal di slip pembayaran PBB.

Untungnya, saat ini pembayaran PBB dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun. Hanya butuh beberapa detik, nominal PBB muncul di aplikasi penyedia jasa pembayaran online yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Saat memasukkan NOP di aplikasi, penulis termenung. Dari 4 NOP yang dibayarkan, tidak satu pun NOP yang bebas denda. Normalnya, hanya 4 NOP yang dibayarkan pada tahun 2021 ini. Akan tetapi, total 9 pembayaran yang harus dilunasi. Ada 1 NOP yang belum terbayar tahun 2018, 2019, dan 2021. NOP lainnya masing-masing 2 tahun yang belum terbayarkan, ada yang tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Pertanyaannya, uang PBB yang dibayarkan setiap tahunnya selama ini mengendap di mana? Apakah uang yang diterima RT/kepala kampung/kepala dusun tidak disampaikan ke aparat desa/kelurahan? Atau aparat desa/kelurahan yang tidak menyetorkan ke petugas pajak di kecamatan, dan kabupaten/kota? Atau petugas pajak yang tidak menyetorkan ke kas negara?

Banyak isu yang kurang sedap didengar yang telah beredar luas di masyarakat. Misalnya, kejadian ini adalah ulah oknum kepala kampung yang tidak menyerahkan uang PBB ke pihak yang seharusnya. Kepala

kampung/dusun/RT yang selama ini membantu pemerintah daerah menagihkan pembayaran PBB ke WP pun diduga menyelewengkan uang PBB warga. Kasian.

Bagaimana jika hal ini tidak terjadi? Pasti namanya dikenang jelek oleh warganya sendiri. Akan tetapi, jika praktik penggelapan uang PBB ini benar terjadi, maka tidak salah jika mengingat kembali kasus korupsi pajak yang menyeret Gayus Tambunan. Bisa dibayangkan berapa banyak uang PBB yang menghilang entah kemana. Menanggapi fenomena tersebut, tentu perlu dilakukan pengelolaan uang PBB yang bersumber dari WP khususnya di daerah pedesaan.

Pemerintah daerah telah membuat sejumlah regulasi dalam memaksimalkan kepatuhan dan kemudahan pembayaran PBB bagi WP di daerahnya. Pembayaran PBB satu pintu merupakan salah satu solusinya. Tetapi, pada daerah yang luas wilayahnya butuh waktu perjalanan berjam-jam mungkin sulit diterapkan. Sehingga pemanfaatan aplikasi yang berbasis teknologi bisa menuntaskannya.

Solusi pembayaran PBB berbasis teknologi pun masih menyisakan persoalan karena masih banyak WP yang tidak memiliki perangkat teknologi seperti HP yang mendukung. Bahkan tidak semua mampu mengoperasikan aplikasi pembayaran PBB online di HP-nya. WP yang kategori ini masih tergantung pada pembayaran PBB secara langsung melalui kepala kampung/dusun/RT setempat.

Kejadian yang menimpa sejumlah WP seperti di atas dapat berdampak buruk pada munculnya ketidakpercayaan WP kepada pemerintah setempat dalam membayar PBB pada tahun-tahun mendatang. Olehnya itu, diperlukan strategi lain dengan mempertimbangkan akses WP di suatu daerah. Misalnya, penyediaan loket pembayaran PBB di pasar-pasar tradisional sehingga mudah dijangkau oleh WP. Penempatan outlet PBB juga dapat di kantor atau balai desa.

Memang, penyediaan outlet PBB di pasar-pasar atau di kantor desa akan menambah beban pengeluaran biaya untuk sewa tempat dan gaji petugas pajak yang jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi, kekhawatiran itu dapat diatasi dengan mengatur jadwal operasional pelayanan pembayaran PBB di setiap desa/kelurahan. Misalnya, di desa A jadwal

pelayanan pembayaran PBB hanya bulan April. Biaya operasional sewa tempat dan honor petugas pajak hanya berlaku 1 bulan saja.

Strategi lainnya adalah memaksimalkan peran petugas pajak untuk melakukan penjangkauan ke rumah-rumah WP. Tentu dengan memberikan sejumlah insentif tambahan kepadanya. Selain itu, penyediaan layanan pajak menggunakan mobil keliling seperti pelayanan SIM keliling yang telah lama diberlakukan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

INGIN MEMILIKI KENDARAAN? SEDIAKAN DULU LAHAN PARKIR

Apakah pembaca pernah menyaksikan motor atau mobil parkir di pinggir jalan raya yang peruntukannya bukan untuk tempat parkir? Atau justru pembaca yang melakukannya? Jika ya, maka itu salah satu pertanda bahwa tingkat kesadaran pembaca masih rendah dalam berlalu lintas.



Gambar 11. Salah satu kendaraan yang berhenti tepat di depan tanda larangan berhenti

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa penggunaan kendaraan bermotor sulit dibatasi dan dikendalikan. Jadi, tidak mengherankan jika setiap harinya hampir semua ruas jalan dipadati kendaraan bermotor, dan bahkan pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan yang sulit terhindarkan.

Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan ruas jalan akan mengakibatkan berbagai dampak negatif. Terutama di daerah perkotaan, kemacetan seolah sudah menjadi pemandangan lazim setiap harinya. Kemacetan lalu lintas berdampak langsung dan tidak langsung terhadap lambatnya distribusi barang dan jasa dari dan menuju daerah tertentu, waktu perjalanan yang semakin lama, dan dampak lainnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah dan pihak terkait di daerah tentu saja sudah melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan terutama di ruas jalan padat kendaraan bermotor. Beberapa daerah di Indonesia rutin melakukan razia kendaraan yang parkir sembarangan, dan bahkan berakhir dengan pemberian denda sejumlah uang terhadap pelaku parkir yang bukan pada tempatnya.

Telah banyak yang terjaring razia dan dikenakan denda, tetapi masih saja ada warga yang melakukan praktik parkir sembarangan. Bahkan, tidak sedikit dari mereka memarkir kendaraannya di area yang dilarang parkir. Memang aneh tetapi itulah faktanya. Tanda larangan parkir yang telah dipasang, tidak membuatnya patuh. Padahal, tanda larangan parkir tampak begitu jelas, tetapi justru kendaraannya diparkir tepat di depan atau di bawah tanda larangan parkir.

Apakah tanda larangan parkir hanya dianggap tanda tanpa arti atau mereka tidak paham arti tanda larangan parkir tersebut? Tidak mungkin karena pengendara pada saat mengurus SIM pengemudi telah dinyatakan lulus pada sejumlah rangkaian tes, salah satunya adalah lulus tes mengenai rambu dan marka jalan.

Berbagai faktor penyebab seseorang tidak patuh larangan parkir antara lain kesadaran berlalu lintas yang masih rendah, tidak memiliki lahan parkir sendiri di rumahnya sehingga memarkir kendaraannya di pinggir jalan raya, hanya patuh rambu lalu lintas jika ada petugas di sekitarnya, dan faktor lainnya.

Olehnya itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran warga dalam berlalu lintas. Selain memaksimalkan kegiatan sosialisasi pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, juga perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan yang mengatur nominal denda tiap pelanggaran, dan jika perlu dengan menambahkan jumlah denda yang maksimal dan tidak dapat dikurangi.

Selain itu, saat ini di beberapa daerah telah diberlakukan tilang elektronik atau e-tilang. Akan tetapi, belum semua daerah memberlakukan kebijakan e-tilang tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa e-tilang dinilai efektif dalam menurunkan praktik pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan dan memaksimalkan penerapan e-tilang di daerahnya.

Banyak kasus pelanggaran yang terjadi terhadap larangan parkir disebabkan karena pemilik kendaraan tidak memiliki lahan parkir pribadi di rumahnya. Akibatnya, mereka memarkir kendaraannya di pinggir jalan raya dan menjadi sumber kemacetan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan pihak penyedia jasa jual beli kendaraan bermotor untuk memastikan bahwa calon pembeli kendaraan harus lulus syarat kepemilikan lahan parkir terlebih dahulu.

Selain itu, perlunya dilakukan razia rutin dan berkelanjutan oleh petugas di lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya. Kehadiran petugas di lapangan terutama pada area padat kendaraan di waktu tertentu juga akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas.

Jika petugas masih menemukan kendaraan yang parkir sembarangan, maka selain mengangkut kendaraan tersebut ke instansi yang berwenang dan selanjutnya diberlakukan denda sejumlah uang, juga perlu diberikan sanksi tegas lainnya seperti penahanan kendaraan sementara waktu sampai pemilik menyediakan lahan parkir pribadi di rumahnya.

MENGGAGAS SOLUSI PENGENDALIAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA REMAJA SISWA

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, adalah bunyi Pasal 1 ayat 24 dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan UU tersebut merupakan bagian dari sistem transportasi nasional untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan suatu wilayah.

Apakah tujuan tersebut dapat dicapai jika kecelakaan lalu lintas masih tetap terjadi? Jawabnya, tidak dapat dicapai. Berdasarkan data Korlantas Polri tentang kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia tahun 2020, tercatat sebanyak 100.028 kecelakaan yang mengakibatkan 23.529 korban meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa jumlah korban meninggal dunia hampir mencapai seperempat dari total kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Bagaimana dengan jumlah korban menurut usia pengguna? Kelompok usia korban kecelakaan lebih banyak dialami usia 10-29 tahun, angkanya mencapai 45,1%, lebih banyak dibandingkan kelompok usia 30-49 tahun yang hanya mencapai 29,3%. Fenomena tersebut didukung sejumlah fakta antara lain jumlah pengguna kendaraan bermotor pada usia 17-29 tahun mencapai 37,74%, lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan kelompok usia 30-49 tahun yang hanya 34,04%. Fakta

menunjukkan bahwa pengguna kendaraan bermotor pada remaja usia sekolah lebih banyak dibandingkan kelompok usia lain.

Mengapa jumlah pengguna kendaraan bermotor pada remaja usia sekolah lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya? Faktanya, total kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai lebih dari 133 juta unit pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi peluang penggunaan kendaraan bermotor pada kelompok remaja usia sekolah pun semakin meningkat. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar masyarakat menempatkan transportasi sebagai tulang punggung perekonomian di tingkat rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Fakta lainnya, tidak sedikit orangtua dari remaja usia sekolah yang telah menyediakan dan membolehkan anak mereka menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan bersekolah. Wawancara dan observasi secara terbatas terhadap 10 orangtua di sekitar tempat tinggal penulis yang memiliki anak SMP dan SMA, hasilnya diperoleh bahwa 80% orangtua yang anaknya menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan sekolah. Berbagai alasan orangtua sehingga mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah antara lain 60% karena kesibukannya sehingga tidak sempat menjemput atau mengantar anak, 10% faktor jarak tempat tinggal ke sekolah yang relatif jauh, dan 10% atas permintaan anak.

Pada umumnya, kelompok remaja usia sekolah belum memiliki kecerdasan emosional yang cukup stabil dalam kehidupan keseharian dan lingkungan sosialnya. Tidak jarang remaja usia sekolah diberitakan di berbagai media massa dan bahkan seringkali disaksikan secara langsung, mereka terlibat aksi perkelahian antar kalangan pelajar, penyalahgunaan narkoba, aksi ugal-ugalan dalam berkendara di jalan raya, kurang mengindahkan peraturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara dan bahkan tidak sedikit dari mereka menjadi korban meninggal dunia.

Sejumlah analisis dan fakta menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada umumnya diawali dari praktik pelanggaran lalu lintas. Hal ini pula yang semakin menguatkan pendapat dan hasil penelitian para pakar dan ilmuan di bidang ilmu perilaku bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas didominasi karena kelalaian seseorang dibandingkan faktor kendaraan, jalan, dan lingkungan. Jika kecelakaan lalu lintas pada remaja

usia sekolah terus terjadi dengan persentasi yang cukup tinggi setiap tahunnya, maka cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan generasi (*lost generations*) sebagai pelanjut pembangunan bangsa.

Pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa tentu tidak menginginkan hal demikian terjadi. Buktinya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah menyusun dan mengimplementasikan sejumlah terobosan program keselamatan transportasi antara lain Program Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Darat, dimana pelajar dijadikan sebagai duta keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk membudayakan keselamatan berlalu lintas sejak dini. Bahkan program ini telah digalakkan sejak tahun 2007 oleh pemerintah dan memperoleh respon positif di berbagai daerah, satuan pendidikan dan tingginya minat para siswa mengikuti program tersebut.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjukkan sikap proaktif dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada kalangan remaja usia sekolah melalui pendidikan dan edukasi keselamatan lalu lintas (*safety riding*) dalam kurikulum pendidikan nasional yang dimulai sekitar tahun 2010 di sejumlah satuan pendidikan. Pada tahun 2018, diberlakukan sistem zonasi di dunia pendidikan yang merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa sistem zonasi pendidikan saat penerimaan siswa baru, secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan orangtua dalam memfasilitasi kendaraan bagi anaknya untuk keperluan sekolah.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan sejumlah pihak perusahaan swasta produsen dan distributor kendaraan serta komunitas kendaraan bermotor seperti Ikatan Motor Indonesia (IMI) tidak ketinggalan juga hadir dalam membantu menyukseskan gerakan *safety riding* dengan menjalin kerja sama pihak Kepolisian RI dan satuan pendidikan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas pada siswa.

Secara khusus, pihak Korlantas Polri telah merencanakan program pembangunan *Indonesia Safety Driving Center (ISDC)* dengan mendirikan pusat sekolah mengemudi yang memenuhi standar dan terakreditasi. Rencana pembangunan ISDC ini akan dimulai tahun 2021 di 15 Polda yang bertujuan menyiapkan wadah belajar, berlatih, dan pembinaan

komunitas serta wadah penyaluran hobi, laboratorium *road safety, test drive*, kompetisi *safety riding/driving*, penyelenggaraan seminar dan pameran teknologi *road safety*. Selain program tersebut, keseriusan Polri dan pemerintah daerah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas juga dibuktikan dengan penerapan sistem tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di sejumlah daerah.

Sejak diberlakukannya program dan kebijakan oleh sejumlah instansi pemerintah dan swasta seperti yang telah diuraikan sebelumnya, faktanya belum mampu menghilangkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dialami remaja usia sekolah. Padahal, program-program tersebut telah banyak melakukan intervensi terhadap perubahan perilaku pengguna dalam mendorong berperilaku keselamatan pada saat berkendara. Menurut penulis, jika program yang selama ini dilakukan oleh banyak pihak dinilai belum maksimal dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada remaja usia sekolah, maka diperlukan strategi pencegahan yang cepat dan tepat sasaran agar tidak mengakibatkan kehilangan generasi penerus pembangunan bangsa.

Sebelum penulis memberikan gagasan solusi dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas pada remaja siswa, maka didahului dengan penjelasan mengenai konsep pengendalian bahaya/risiko yang dikenal dengan *Hierarchy of Controls* yang dikembangkan oleh *The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)*. Pengendalian bahaya/risiko menurut NIOSH memiliki urutan tingkat keefektifan, kehandalan dan proteksi dari paling efektif hingga kurang efektif. Adapun urutannya adalah eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Meskipun setiap pengendalian memiliki tingkat efektivitas yang berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa kontrol dengan pertimbangan tertentu.

Eliminasi

Adalah upaya pengendalian bahaya/risiko yang paling efektif dibandingkan yang lainnya dengan cara menghilangkan sumber bahaya kecelakaan. Sumber bahaya terjadinya kecelakaan lalu lintas pada kalangan remaja usia sekolah adalah kendaraan bermotor seperti sepeda

motor dan mobil, maka penggunaan kendaraan bermotor pada siswa sekolah harus ditiadakan. Siswa tidak boleh lagi menggunakan kendaraan bermotor saat berangkat sekolah dan pulang dari sekolah menuju rumahnya.

Upaya eliminasi sumber bahaya/risiko untuk mencegah kecelakaan merupakan salah satu rekomendasi para pakar dan pihak yang peduli keselamatan transportasi. Bahkan, menempatkan upaya eliminasi sebagai cara paling efektif dalam mencegah kecelakaan. Meniadakan penggunaan kendaraan bermotor pada siswa sekolah, maka akan menghilangkan pula kecelakaan lalu lintas bagi mereka di jalan raya.

Menghilangkan penggunaan kendaraan bermotor pada remaja siswa untuk keperluan sekolah, telah dipraktikkan selama Covid-19 melanda Indonesia. Beberapa hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa angka kecelakaan yang dialami remaja siswa selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Remaja siswa lebih banyak mengakses pembelajaran sekolah di rumahnya masing-masing dengan bantuan pendampingan orangtua. Menurut penulis, salah satu solusi untuk eliminasi penggunaan kendaraan bermotor pada remaja siswa dalam mengakses sekolah adalah program *homeschooling*. Hal ini tidak berarti bahwa penulis mengharapkan pandemi berlangsung terus-menerus sehingga remaja siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan pendidikannya, akan tetapi kejadian pandemi ini memberikan pengalaman bahwa seorang siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran di rumah tanpa harus ke sekolah.

Selain itu, penulis menilai bahwa sejak pandemi Covid-19, muncul kembali sejumlah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya kurang diminati lagi yakni kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Bahkan, saat ini kegiatan berjalan kaki dan bersepeda oleh sebagian masyarakat telah menjadi gaya hidup selain alasan kebugaran. Kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda di masyarakat, dapat menjadi solusi alternatif bagi siswa dalam mengakses pendidikan tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor.

Substitusi

Adalah upaya mencegah atau mengurangi bahaya/risiko yang bersumber dari alat/mesin/bahan dan menggantikannya dengan

alat/mesin/bahan yang kurang atau bahkan tidak membahayakan penggunaannya. Kaitannya dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada siswa sekolah melalui upaya substitusi, maka penggunaan kendaraan bermotor secara langsung oleh siswa dapat disubstitusi dengan sejumlah fasilitas pengganti yang dapat mengurangi potensi bahaya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain pemanfaatan bus antar-jemput khusus siswa.

Selain upaya tersebut, orangtua dari siswa dapat menjalin kerjasama dan berlangganan dengan pihak penyedia jasa transportasi seperti angkutan umum atau angkot. Begitu pula, saat ini telah tersedia banyak teknologi aplikasi jasa transportasi online, sehingga orangtua dapat memanfaatkan kesempatan ini dan tidak lagi menyediakan kendaraan bermotor bagi anaknya untuk keperluan sekolah.

Pengendalian Teknik

Urutan pengendalian selanjutnya adalah upaya pengendalian secara teknik yakni melakukan perancangan alat/mesin/lingkungan dari yang berbahaya menjadi kurang berbahaya. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami siswa, dapat dilakukan sejumlah upaya pengendalian bahaya secara teknik antara lain memberikan pelindung/pengaman khusus pada kendaraan bermotor yang digunakan oleh siswa yang berfungsi membatasi laju kecepatan kendaraan. Hal ini juga telah disarankan sejumlah pihak kepada produsen kendaraan untuk membatasi produksi kendaraan yang tidak melebihi mesin berkapasitas 80 cc.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat memaksimalkan penggunaan keberadaan jalur khusus pejalan kaki, sepeda, motor, dan mobil. Sebenarnya, upaya ini bahkan telah lama diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi penggunaan dan pengawasannya masih kurang maksimal sehingga tidak jarang masih ditemukan siswa sebagai pengguna kendaraan bermotor memilih jalur yang bukan seharusnya dilalui dan akhirnya mereka mengalami kecelakaan lalu lintas.

Upaya pengendalian secara teknik lainnya adalah melengkapi kendaraan bermotor dengan standar keamanan dan keselamatan kendaraan. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengguna

mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan kendaraan seperti mengubah atau memasang elemen tertentu pada mesin kendaraan agar kecepatannya melebihi rata-rata kecepatan kendaraan sejenisnya, menghilangkan elemen atau *sparepart* kendaraan dan menggantinya atau menambahkan *sparepart* khusus dengan tujuan modifikasi tetapi justru membahayakan keselamatan pengguna.

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan secara bijaksana dalam membantu mencegah atau mengurangi kecelakaan lalu lintas pada siswa. Misalnya penambahan atau pemasangan alat tertentu pada kendaraan yang berfungsi memberikan signal/alarm dan notifikasi atau pemberitahuan jika terdapat sumber bahaya kecelakaan secara cepat dan akurat yang terdapat di sekitar pengguna. Alat ini tentu terkoneksi dengan perangkat teknologi penerima pesan seperti telepon genggam para pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, sekolah, orangtua dan siswa sebagai pengguna kendaraan bermotor.

Pengendalian Administratif

Adalah upaya pengendalian bahaya/risiko kecelakaan secara administrasi seperti ketersediaan prosedur dan aturan, pelatihan, durasi penggunaan, rambu atau tanda bahaya, poster, pemasangan label atau lembar data bahaya keselamatan, dan hal lainnya. Pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat dilakukan pada siswa antara lain memperketat prosedur penerbitan SIM khusus siswa dengan penambahan sejumlah persyaratan administrasi pada saat permohonan penerbitan SIM, selain hal-hal yang telah dipersyaratkan sebelumnya dari pihak kepolisian.

Persyaratan administrasi tambahan seperti persetujuan orangtua siswa disertai pernyataan siswa bahwa bersedia mematuhi peraturan keselamatan berkendara dan sanksi administrasi berupa pencabutan SIM beserta denda lainnya sesuai peraturan yang berlaku jika terbukti melakukan pelanggaran dengan membatasi jumlah maksimal pelanggaran yang dilakukan. Upaya pengendalian administrasi lainnya adalah program pelatihan berupa sekolah mengemudi khusus siswa yang

dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak sekolah, komite sekolah, dan pihak kepolisian setempat.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait lainnya dapat menyusun kebijakan mengenai pengaturan jadwal antar-jemput anak sekolah oleh orangtua siswa yang memiliki kesibukan pekerjaan. Kesibukan orangtua menjadi alasan dominan sehingga mereka memilih menyediakan kendaraan bermotor bagi anaknya. Upaya ini memerlukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan sejumlah pihak baik orangtua siswa, pemerintah daerah, unsur legislatif, pihak sekolah, dan sejumlah pihak lainnya.

Alat Pelindung Diri

Upaya pengendalian bahaya/risiko yang dinilai kurang efektif dibandingkan upaya pengendalian lainnya adalah penggunaan APD. Tujuannya untuk mengurangi tingkat risiko keparahan jika terjadi kecelakaan lalu lintas pada siswa pengguna kendaraan bermotor. Upaya pengendalian bahaya/risiko melalui penggunaan APD adalah upaya reaktif bukan proaktif dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, menjaga keselamatan siswa pengguna kendaraan bermotor di jalan raya adalah tetap penting diupayakan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam mendorong siswa tetap patuh berperilaku dalam menggunakan APD adalah memaksimalkan sosialisasi *safety riding* kepada siswa sebagai pengguna kendaraan bermotor ke sekolah. Pihak sekolah dan kepolisian setempat secara rutin dan berkesinambungan melakukan upaya sosialisasi *safety riding*, tidak hanya saat momentum penerimaan siswa baru saja. Selain itu, perlu upaya pemberdayaan orangtua siswa melalui pendidikan keselamatan transportasi agar mampu berperan aktif sebagai edukator dan memastikan anaknya selalu menggunakan APD lengkap saat berkendara seperti penggunaan helm berstandar yang dilengkapi pelindung wajah, penggunaan sepatu, dan sarung tangan serta sabuk keselamatan khususnya bagi siswa pengendara mobil.

Solusi Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja Siswa

Menurut penulis, diperlukan suatu model pengendalian kecelakaan lalu lintas pada remaja siswa yang relatif ekstrim. Upaya tersebut adalah eliminasi atau meniadakan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa yang merupakan sumber bahaya/risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Model pengendalian ini dinamakan SALAM SENATOR (akronim; Siswa Selamat Sekolah Tanpa Motor). Sebagai seorang Senator, maka diharapkan siswa lebih proaktif di sekolah dan lingkungan pergaulannya dalam mengampanyekan program ke sekolah tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor.

Sejumlah keunggulan model ini antara lain dapat menghilangkan kecelakaan lalu lintas pada siswa yang disebabkan penggunaan kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas yang seringkali terjadi pada waktu menjelang masuk dan pulang sekolah di titik area tertentu. Selain itu, model ini dapat mengurangi kekhawatiran orangtua tentang kehadiran anaknya di sekolah dan sekaligus membuka wawasan orangtua dalam menentukan alternatif pembelajaran bagi anaknya selain harus datang menuntut ilmu secara langsung di sekolah.

Apakah pemilihan solusi eliminasi tidak akan menimbulkan permasalahan lain? Pasti akan menimbulkan masalah tetapi bukan masalah kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif tambahan jika memilih mengimplementasikan model ini yakni berjalan kaki, bersepeda, dan program *homeschooling*. Ketiga alternatif tersebut mampu menghilangkan sumber bahaya/risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan penggunaan kendaraan bermotor pada remaja siswa.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah model Salam Senator ini dapat berjalan efektif? Iya. Alasannya, pemberlakuan sistem zonasi di dunia pendidikan yang telah digalakkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2018 dapat mendukung dalam menyukseskan model Salam Senator. Dalam praktiknya, sistem zonasi selain mempertimbangkan nilai akademik dan prestasi siswa juga pertimbangan jarak tempat tinggal siswa dan sekolah. Semakin dekat jarak tempat tinggal siswa dan sekolah tujuan, maka akan memudahkan siswa dalam menjangkau sekolah. Hanya dengan berjalan

kaki atau bersepeda, mereka telah sampai di sekolah dengan aman dan selamat.

Begitu pula dengan sistem pembelajaran *homeschooling* yang telah berlangsung di Indonesia, telah banyak kalangan masyarakat tertentu memilih alternatif ini dengan berbagai alasannya. Buktinya, masyarakat Indonesia telah mampu beradaptasi dengan teknologi informasi saat ini sehingga memudahkannya dalam mendampingi siswa mengenyam pendidikan melalui program *homeschooling*. Program ini merupakan salah satu solusi dari model Salam Senator untuk menghilangkan sumber bahaya/risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan penggunaan kendaraan bermotor pada remaja siswa tanpa mengabaikan kesempatan siswa dalam menuntut ilmu.

Solusi-solusi tersebut dinilai dapat menyukkseskan penerapan model Salam Senator. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak upaya pengendalian bahaya/risiko lainnya yang dapat diimplementasikan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas pada remaja siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu riset ilmiah sehingga menghasilkan gagasan yang lebih komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Tujuannya adalah diperoleh solusi yang lebih terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah menyediakan ruang publikasi untuk menyebarluaskan gagasan ini.

DUKA NANGGALA 402 DAN KEBANGKITAN PERTAHANAN

Teka-teki menghilangnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala 402 di perairan utara Pulau Bali pada Rabu (21/4/2021) sekitar pukul 04.25 WIB, kini telah memasuki babak baru. Kapal selam buatan Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) Jerman pada tahun 1977, dan bergabung dengan jajaran TNI AL tahun 1981, kini statusnya telah diketahui. Seperti namanya, Nanggala 402 tetap setia mengarungi perairan Indonesia dengan keperkasaannya dan didukung kemampuan personel hebat yang dimiliki TNI AL.

Sebagai pengabdian negara dan kesetiaan mereka menjaga keutuhan kedaulatan NKRI dari semua potensi bahaya yang dapat mengganggu Indonesia, KRI Nanggala 402 terdepan dan secara rutin melakukan latihan di perairan Indonesia. Pada hari nahas itu, Nanggala 402 mengikuti latihan penembakan torpedo, dan saat diberikan respons atas permintaan otorisasi penembakan justru Nanggala 402 tidak lagi memberikan respons. Sejak itu pula, prosedur kedaruratan pun dilakukan oleh TNI, dimulai dengan menetapkan status dari mencari (*sublook*), lalu ditingkatkan menjadi hilang (*submiss*) dan terakhir dinyatakan tenggelam (*subsunk/submarine sunk*). Status hilangnya KRI Nanggala 402 juga dinyatakan *on eternal patrol*, sebuah istilah yang disematkan kepada kapal selam yang hilang dan tak berhasil kembali ke pelabuhan.

TNI dan semua kekuatan bangsa dikerahkan dalam proses pencarian Nanggala 402 sesaat setelah dinyatakan hilang kontak. Tidak sedikit peralatan canggih disertai personel handal dalam pencarian Nanggala 402. Tidak ketinggalan bantuan peralatan dan personel negara-negara sahabat yang turut dalam proses pencarian Nanggala 402. Peningkatan status

menjadi *subsunk* dan *on eternal patrol* dilakukan dengan penemuan sejumlah bukti otentik di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, akhirnya pada hari Minggu, 25 April 2021, Panglima TNI menyatakan Indonesia telah kehilangan 53 putra terbaik di bidang angkatan laut. Nanggala 402 tengah melakukan patroli abadi di lautan. Kini, status keberadaan Nanggala 402 telah ditemukan dan proses pengangkatannya dari lokasi titik penemuan ke permukaan tetap akan dilanjutkan.

Gelombang kesedihan yang mendalam tidak hanya dirasakan oleh keluarga para pejuang kelautan NKRI, akan tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kesedihan tampak bergemuruh hingga seantero negeri. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi dan keikhlasan menghadapi kenyataan pahit di akhir bulan April 2021. Indonesia telah kehilangan putra-putra pejuang dan patriot penjaga kelautan NKRI pada tanggal 21 April 2021.

Semangat juang yang tinggi telah diperlihatkan oleh para pejuang kelautan di Nanggala 402. Selain kaya dengan sumber daya alam, negara ini juga didukung dengan orang-orang hebat yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air tidak diragukan lagi. Telah dibuktikan dengan 53 patriot Nanggala 402 yang gagah berani dan semangat cinta tanah air, tidak pernah takut akan tantangan ganasnya ombak dan situasi alam bawah laut yang misterius. Semua dilakukannya karena pengabdian pada negara yang kita cintai bersama.

Nanggala 402 yang *subsunk dan on eternal patrol* merupakan pertanda bahwa semangat memajukan teknologi informasi melalui pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi. Tujuannya adalah menyiapkan generasi muda yang cerdas dan terampil dalam menciptakan teknologi baru di bidang pertahanan dan keamanan. Ketersediaan teknologi modern dan lengkap, akan sangat membantu negara kita saat mengalami musibah apapun. Bahkan, tidak hanya itu, kecanggihan peralatan dan teknologi yang diproduksi secara mandiri dan massif juga dapat diperjualbelikan dan digunakan oleh negara lain di dunia. Terbukti, negara kita telah mampu melakukannya.

Keberanian dan semangat tidak mudah menyerah yang dimiliki para patriot Nanggala 402, patut ditanamkan dalam setiap jiwa generasi penerus bangsa. Semangat cinta tanah air telah ditunjukkan para pejuang

Nanggala 402. Mereka dengan jiwa patriotnya, keberaniannya, dan keikhlasannya dalam mengabdikan, telah mengajarkan kepada kita bahwa cinta tanah air yang sebenarnya tidak memikirkan diri sendiri dan keluarganya, tetapi cinta tanah air pada hakikatnya untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kekuatan dan kehandalan personil TNI yang dimiliki Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa sebuah kekuatan yang tidak diragukan lagi kehebatannya. Dalam berbagai event internasional, Indonesia selalu hadir sebagai pemenang. Kehebatan SDM yang dimiliki Indonesia kurang lengkap jika tidak didukung dengan peralatan dan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, negara perlu hadir memberikan dukungan manajemen dan finansial untuk pembangunan dan pengembangan produksi teknologi peralatan utama sistem senjata (alutsista), baik alutsista kekuatan militer darat, udara, maupun laut.

Selain karena Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau dan dipisahkan lautan cukup luas yang perlu dijagkau dan dilindungi serta keperluan pertahanan dan keamanan, kehadiran Indonesia selalu dibutuhkan oleh dunia, baik dalam misi sosial kemanusiaan maupun perdamaian dunia. Belajar dari kejadian yang dialami Nanggala 402, tidaklah berlebihan jika Kementerian Pertahanan RI perlu didukung dengan pembiayaan yang cukup besar dibandingkan kementerian lainnya.

Kekosongan Nanggala 402 dalam membantu menjaga kedaulatan NKRI dari segala bentuk bahaya yang mengancam NKRI melalui perairan, bukanlah akhir dari perjuangan menjaga negeri ini, melainkan titik balik semangat kebangkitan pertahanan NKRI. Negara ini masih membutuhkan kehadiran Nanggala-Nanggala pejuang kelautan lainnya untuk mengisi kekosongan dan melanjutkan perjuangan Nanggala 402. Selamat berpatroli abadi Nanggala 402. Indonesia mencatat perjuangannya. Seluruh rakyat Indonesia mendoakan dan merindukanmu.

MENJADI GURU “MESIN HURUF VOKAL”

Setiap tanggal 2 Mei diperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), dan mengingatkan kembali kelahiran tokoh pelopor pendidikan Indonesia yakni Ki Hadjar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Peringatan Hardiknas sebagai wujud penghargaan terhadap jasa dan perjuangan tenaga pendidik (guru dan dosen, selanjutnya disebut guru) dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Kehadiran guru tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan, sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Guru perlu memiliki sejumlah persyaratan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Profesionalisme dan tanggung jawab guru dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, sudah tidak perlu diragukan lagi. Zaman boleh berubah, tetapi komitmen dan konsistensi guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak pernah padam. Tetap menjadi terdepan dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian. Seorang presiden, politisi, ASN, TNI, Polri, diplomat, wartawan, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya merupakan karya nyata pengabdian guru dalam memajukan pendidikan nasional.

Apakah seorang guru yang telah mengabdikan dirinya sebelum era teknologi informasi, mengalami kesulitan dalam mencetak generasi penerus bangsa saat ini? Tidak pada sebagian guru, tetapi sebagian lainnya mungkin mengalami kesulitan. Era teknologi dan keterbukaan

informasi telah “memaksa” dan mengantarkan sebagian guru mampu menjadi pendidik sukses. Akan tetapi, sebagian lainnya mungkin menjadikan teknologi informasi sebagai sebuah momok dan akhirnya guru tersebut menjadi mesin pencetak generasi yang seadanya.

Ketersediaan internet yang mampu menjangkau seluruh pelosok daerah, telah membawa sejumlah perubahan positif dalam dunia pendidikan. Banyak guru yang sukses mengupdate materi ajar dan metode mengajarnya. Pada beberapa kasus, peserta didik justru lebih cepat update teknologi informasi dibandingkan gurunya. Akibatnya, tidak sedikit pula guru yang “slow respon information” menjadi fasilitator pasif dalam setiap diskusi baik di ruang kelas maupun pada forum diskusi lainnya.

Mengapa masih saja ada guru yang menjadi alergi terhadap teknologi informasi? Mungkin guru seperti ini masih menganggap era teknologi informasi memiliki sejumlah dampak negatif bagi generasi bangsa, sehingga masih mempertahankan bahan ajar dan metode mengajar yang selama ini dilakukannya. Memang, sejumlah anak didiknya telah sukses di bidangnya melalui kemampuan sang guru dalam mengajar. Akan tetapi, bukankah ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dan berkembang begitu cepatnya? Olehnya itu, seorang guru harus mampu menjadi pendidik profesional dan informatif.

Apakah guru yang gagap teknologi informasi difungsikan saja sebagai guru “serep”? atau jika perlu disarankan pensiun dini? Munculnya pertanyaan ini karena ada kegelisahan akan nasib pendidikan nasional saat ini dan masa depan generasi bangsa. Tidak mungkin seorang guru akan dijadikan serep atau bahkan pensiun dini dari profesinya.

Guru memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat UU, sehingga seorang guru tidak mungkin mencederai predikat kemuliaan profesinya hanya karena kegagalan teknologi informasi. Oleh karena itu, guru harus meleak teknologi informasi. Pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang guru masa kini? Guru harus selalu hadir terdepan, berfungsi sebagai mesin kekinian untuk mencetak generasi unggul. Tentunya, dibutuhkan seorang guru yang memiliki sikap dan ciri kekinian. Penulis akan mengulas sebuah konsep guru masa kini yang dinamakan Mesin A, I, U, E, O atau Mesin Huruf Vokal (Akronim; Menghilangkan Egoisme. mampu Bersinergi, Adaptif, Inovatif,

Update, Energik, Open minded). Sebuah pendekatan dalam mencetak seorang guru yang unggul dan kekinian.

Hampir semua kebutuhan seseorang saat ini dapat terpenuhi oleh kehadiran teknologi informasi, tidak terkecuali seorang guru yang ingin tampil dengan gaya mengajar masa kini pun telah difasilitasi oleh teknologi informasi. Cukup dengan menginput kata kunci di mesin pencarian, semua otomatis tersedia. Bukan lagi zamannya seorang guru untuk mengatakan bahwa hasil pemikirannya adalah yang menjadi satu-satunya sumber referensi yang benar, dan pemikiran orang lain dianggapnya salah. Guru kekinian harus mampu meminimalkan dan segera menghilangkan egoisme keilmuannya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua aspek kehidupan yang berlangsung saat ini, begitu cepat mengalami perubahan dan berkembang hampir setiap detik. Seseorang yang gagap teknologi informasi, maka akan mengalami ketertinggalan atau ditinggalkan oleh kemajuan iptek. Seorang guru dituntut bekerja secara maksimal, sungguh-sungguh, terukur, dan dapat dinilai berdasarkan parameter kerjanya. Olehnya itu, seorang guru kekinian harus memiliki kemampuan bersinergi dengan memanfaatkan semua komponen iptek di sekitarnya.

Bagaimana menghadirkan seorang guru masa kini yang tidak egois dan dapat bersinergi? Pertama, seorang guru harus adaptif. Saat ini, semua perkembangan iptek dapat diakses hanya dengan satu perangkat teknologi dalam genggaman. Contohnya, materi pelajaran, hasil riset, dan pemikiran terbaru para ilmuwan di bidang tertentu, semuanya dapat diperoleh secara cepat oleh siapapun, cukup dengan satu sentuhan jari. Seorang guru yang adaptif teknologi informasi, dapat menghilangkan egoisme guru tentang sesuatu hal yang selama ini dipertahankannya.

Kedua, seorang guru harus inovatif. Saat ini, seorang guru harus mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Misalnya, seorang guru yang terbiasa dan mengandalkan dirinya selama ini sebagai subjek dan menganggap peserta didik sebagai objek, maka kini harus berinovasi menciptakan suasana ruang kelas yang hidup yakni menjadikan dirinya dan peserta didik sebagai subjek, ilmu pengetahuan adalah objek kajian.

Ketiga, seorang guru harus update terhadap teknologi informasi. Melek teknologi akan membantu seorang guru mampu menjangkau informasi secara global. Misalnya, memperbaharui bahan ajar dan informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik disesuaikan dengan situasi terkini secara global. Diskusi dalam ruang kelas dan forum diskusi lainnya akan lebih hidup jika dilengkapi dengan menu isu terkini.

Keempat, seorang guru harus energik baik dalam mencari referensi bahan mengajar maupun dalam transfer ilmu pengetahuan. Peserta didik akan bersemangat mengikuti pelajaran tertentu jika difasilitasi oleh seorang guru yang penuh semangat. Guru menjadi tokoh yang dapat mempengaruhi perilaku atau bahkan sebagai panutan peserta didiknya.

Kelima, seorang guru harus *open minded*. Guru yang baik adalah guru yang mampu menghargai pendapat peserta didiknya meski berbeda dengan pendapatnya. Perbedaan pendapat dalam suatu ruang kelas atau forum diskusi lainnya merupakan hal wajar. Sekali lagi, bahwa informasi saat ini dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Idealnya, seorang guru hadir sebagai fasilitator dalam suatu diskusi, bukan sebagai penguasa tunggal ilmu pengetahuan.

Selain pendekatan Mesin A, I, U, E, O, seorang guru harus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademiknya. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu mendukung pembiayaan dan membuka kesempatan izin atau tugas belajar kepada guru di daerahnya agar kompetensi dan kualifikasi akademik guru dapat ditingkatkan. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi akademik guru, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kualitas guru dalam *transfer of knowledge* dan juga kualitas peserta didiknya. Kualitas pembangunan dan kemajuan suatu daerah perlu didukung oleh SDM yang berkualitas.

MEMBANGKITKAN SEMANGAT PEDULI PENDIDIKAN ANAK MELALUI YOUTUBE

Pemanfaatan teknologi informasi sekarang ini, tidak lagi menjadi hal baru dan barang langka. Seluruh komponen masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi informasi. Mulai dari kalangan anak-anak hingga lansia, di perkotaan hingga pedesaan, masyarakat pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi, kalangan kaya hingga kalangan ekonomi lemah, pejabat hingga rakyat biasa, peserta didik hingga tenaga pendidik, semuanya sudah terbiasa dengan teknologi informasi.

Kehadiran teknologi informasi saat ini seperti pisau bermata ganda, berdampak positif pada satu sisi, tetapi negatif di sisi yang lainnya. Tidak jarang kita menyaksikan di berbagai media diberitakan tentang adanya kasus kriminal dan pelecehan seksual sebagai dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Bahkan, banyak warga yang menjadi pelaku ataupun korban penipuan melalui teknologi informasi seperti korban arisan fiktif, korban berita bohong (*hoax*), korban undian hadiah fiktif, dan banyak lagi kasus lainnya.

Selain menimbulkan dampak negatif, teknologi juga memiliki banyak keunggulan. Contohnya, menjadi media alternatif utama dalam pembelajaran khususnya di masa pandemi sekarang ini, kemudahan dan kecepatan mengakses informasi terkini baik secara global maupun nasional, menjadi media komunikasi antara dua keluarga dan sahabat yang saling berjauhan, kemudahan dalam transaksi jual-beli barang dan jasa, kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, dan bahkan memudahkan seseorang dalam berpartisipasi secara tidak langsung dalam memajukan dunia pendidikan.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat tergantung pada penggunaannya. Jika pengguna menyalahgunakannya, maka dapat berdampak buruk bagi pengguna atau orang lain dan bahkan tidak sedikit yang berujung kasusnya di meja pengadilan. Sebaliknya, pengguna yang bijaksana dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka selain terhindar dari tindakan pelanggaran hukum juga akan memperoleh sejumlah keuntungan.

Sisi positif pemanfaatan teknologi juga dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh penulis. Teknologi informasi tidak hanya membantu penulis dalam menyebarluaskan informasi atau gagasan mengenai isu tertentu, tetapi teknologi juga memudahkan penulis dalam menyebarluaskan semangat saling berbagi dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan membuat dan mengajak para dermawan yang peduli pendidikan anak untuk saling berbagi dan menolong generasi muda dalam menuntut ilmu melalui channel saluran Youtube yakni Anthaki Channel.

Kehadiran Anthaki Channel merupakan salah satu wujud kepedulian penulis dan kerabat dalam mendorong atau memotivasi anak untuk terus menuntut ilmu. Tujuannya adalah membantu pemerintah dalam meminimalkan jumlah anak putus sekolah karena alasan keterbatasan ekonomi keluarga. Penulis yakin bahwa setiap anak pasti memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri permasalahan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor pendukung mencapai keberhasilan anak dalam menuntaskan jenjang pendidikannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengupayakan secara maksimal agar setiap anak memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam mengakses pendidikan formal. Faktanya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti program pendidikan gratis bagi setiap anak usia sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bahkan, pemerintah melalui kementerian telah menyediakan sejumlah fasilitas beasiswa untuk membantu pendidikan anak di berbagai satuan pendidikan.

Kebijakan pemerintah tentang program pendidikan gratis ternyata masih menyisakan permasalahan yang cukup mendasar bagi sebagian orangtua siswa. Masih ditemukan banyak orangtua yang kesulitan dalam menyekolahkan anaknya karena alasan ekonomi. Orangtua masih membutuhkan sejumlah biaya yang harus dipersiapkan, baik sebelum

anaknya mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan tertentu maupun setelah aktif bersekolah, misalnya biaya pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang dibutuhkan sang anak.

Sejak pembentukannya, Anthaki Channel menyajikan informasi kepada khalayak mengenai kegiatan sosial yang telah dilakukannya. Penyebarluasan informasi kegiatannya melalui media Youtube, tidak bermaksud pamer atau ingin terkenal, akan tetapi media tersebut difungsikan sebagai sarana untuk menyerukan pentingnya saling berbagi dan kebersamaan dalam memajukan pendidikan Indonesia. Saling berbagi tidak hanya terbatas pada bantuan materil semata kepada anak, tetapi juga berbagi informasi dan motivasi bagi anak agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu.

Keberadaan Anthaki Channel yang masih relatif baru dan serba terbatas dalam menggalakkan gerakan saling berbagi untuk pendidikan anak yang lebih baik, tentu mengalami sejumlah hambatan dan tantangan dalam melaksanakan programnya. Menyebarluaskan semangat saling berbagi untuk pendidikan anak yang lebih baik merupakan tanggung jawab moral kita bersama. Penulis sangat menghargai dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pembaca di berbagai daerah yang telah dan sedang melakukan banyak kegiatan sosial yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Kalian adalah sosok pengabdian yang dibutuhkan bangsa ini.

BAGAIMANA BSI MENGAET PARA CALON NASABAH?

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dan berinteraksi dengan perbankan. Sebagian besar masyarakat menganggap perbankan identik dengan uang. Faktanya memang demikian, jika seseorang membutuhkan sejumlah uang, maka perbankan menjadi alternatif untuk mengajukan pinjaman. Sebaliknya, seseorang yang memiliki cukup banyak uang pun memilih perbankan sebagai tempat menyimpan atau menabung uangnya.

Saat ini, masyarakat tidak hanya mengenal jenis perbankan konvensional, tetapi juga telah mengenal dan memilih jenis perbankan syariah, baik sekadar untuk meminjam uang, menabung maupun tujuan investasi masa depan. Apalagi, sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 Februari 2021, masyarakat Indonesia semakin terbiasa mendengar istilah bank syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal lebih dekat dengan BSI, apalagi memanfaatkannya, salah satunya adalah penulis. Pertanyaannya, apakah informasi tentang BSI yang telah banyak tersedia di berbagai media, masih kurang menjelaskan secara lengkap mengenai BSI? Iya. Sebagai orang awam masalah perbankan khususnya bank syariah, penulis masih kesulitan dalam menerjemahkan banyaknya istilah yang diberlakukan di BSI. Masih dibutuhkan penjelasan detail secara operasional dari istilah-istilah perbankan syariah tersebut.

Sekali lagi bahwa sebagai orang awam, penulis menganggap semua jenis perbankan dalam praktiknya sama saja. Mungkin saja banyak calon nasabah di daerah lain juga masih memiliki persepsi yang sama dengan

penulis, sehingga mereka pun belum memutuskan untuk menjadi nasabah BSI. Adanya persepsi tersebut dapat disebabkan karena masih miskinnya pengetahuan penulis tentang BSI.

Selain persepsi yang menyamakan semua jenis perbankan, penulis juga masih merasakan kendala dalam mengakses BSI. Padahal, tempat tinggal penulis dapat dikategorikan wilayah perkotaan, lalu bagaimana masyarakat yang memang tempat tinggalnya di pedesaan? Tentunya akan menjadi salah satu faktor penghambat baginya untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah baru BSI. Selain itu, penulis juga dibayang-bayangi pengalaman buruk saat berurusan di salah satu bank konvensional. Suatu hari, penulis mengurus pergantian kartu ATM, ternyata membutuhkan waktu lebih dari tiga jam untuk mengantri sampai selesai dilayani. Akibatnya, sejumlah tugas penulis menjadi tertunda.

Apakah yang dialami penulis hanya itu saja, sehingga belum memutuskan untuk menjadi nasabah BSI hingga sekarang? Masih ada. Pada suatu hari penulis mengunjungi salah satu bank konvensional dengan tujuan membuka rekening baru di bank tersebut. Saat itu, penulis mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat minimal uang setoran awal. Akhirnya, rencana pembukaan rekening baru di bank tersebut harus berakhir kekecewaan. Lagi dan lagi, penulis berpersepsi bahwa hal yang sama juga diberlakukan di BSI, sehingga penulis belum memutuskan menjadi nasabah BSI hingga sekarang.

Pengalaman-pengalaman tersebut pernah dialami langsung oleh penulis, dan mungkin juga pernah dialami calon nasabah lainnya di berbagai daerah, sehingga mereka belum memutuskan untuk menjadi nasabah BSI. Lalu, bagaimana strategi yang perlu dilakukan BSI agar mampu menggaet penulis dan calon nasabah lainnya? Penulis akan menjelaskan sejumlah strategi pendekatan yang dapat dilakukan BSI berdasarkan kebutuhan penulis. Tujuannya untuk menghilangkan persepsi buruk penulis tentang perbankan, dan di waktu yang bersamaan BSI mendorong penulis untuk bersedia menjadi nasabahnya dengan menawarkan sejumlah kemudahan dan keunggulan BSI dibandingkan bank konvensional.

Pertama, penulis membutuhkan penjelasan lengkap tentang BSI karena informasi mengenai BSI yang tersedia di berbagai media saat ini, belum mampu menggugah keinginan penulis untuk menjadi nasabah BSI.

Terbukti, hingga hari ini, penulis belum memiliki rekening tabungan di bank syariah mana pun, termasuk di BSI. Minimnya penjelasan lengkap secara operasional mengenai BSI, berdampak pada munculnya persepsi buruk penulis tentang BSI. Olehnya itu, BSI harus menyebarkan informasi secara masif dan berkelanjutan tentang keunggulan BSI dibandingkan bank konvensional. Tidak cukup hanya dengan menyajikan informasi melalui media, tetapi penulis juga membutuhkan penjelasan langsung dan berkelanjutan dari pihak BSI melalui personil yang dinilai kompeten di bidangnya.

Kedua, penulis dan mungkin calon nasabah BSI lainnya membutuhkan kemudahan dalam mengakses jarak tempat tinggal ke unit atau cabang BSI. Oleh karena itu, penambahan unit atau cabang BSI merupakan faktor penting dalam mendorong penulis untuk menjadi nasabah BSI. Ketersediaan unit-unit BSI yang berdekatan dengan pemukiman warga, tentu akan menjadi nilai lebih bagi BSI baik dalam menggaet jumlah nasabah baru maupun dalam meningkatkan kepuasan nasabah BSI.

Ketiga, penulis membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam memperoleh setiap jenis layanan perbankan, sehingga penulis masih tersedia cukup waktu produktif untuk tugas yang lainnya. BSI harus menyusun dan menerapkan secara konsisten standar pelayanan dan waktu minimal untuk setiap jenis layanan yang dibutuhkan oleh nasabah. Tidak hanya sekedar hiasan yang ditempel di dinding bank, tetapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Jika terbukti ada pegawai BSI yang tidak mematuhi standar pelayanan yang telah disepakati secara bersama-sama, maka BSI harus berani memberikan sanksi tegas kepada personil tersebut.

Keempat, penulis membutuhkan keringanan uang setoran awal pada saat pembukaan rekening baru di BSI. Saat ini, menurut beberapa sumber yang diperoleh penulis, BSI telah menetapkan uang setoran awal minimal Rp. 100.000, akan tetapi nominal tersebut mungkin saja masih dinilai memberatkan bagi sebagian calon nasabah baru BSI. Apakah BSI akan memberlakukan bebas uang setoran awal bagi nasabah barunya? Mungkin saja. Gebrakan BSI tentunya dinantikan oleh banyak calon nasabah.

BAGAIMANA MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI KECELAKAAN LALU LINTAS?

Kita sudah sering mendengar berita dan bahkan menyaksikan secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di jalan raya. Secara jelas dalam UU No. 22 tahun 2009 disebutkan bahwa lakalantas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut data Korlantas Polri tentang kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia tahun 2020, tercatat sebanyak 100.028 kecelakaan yang mengakibatkan 23.529 korban meninggal dunia. Artinya, jumlah korban meninggal dunia sekitar seperempat dari total kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahunnya.

Kelompok usia 10-29 tahun merupakan korban kecelakaan tertinggi, angkanya mencapai 45,1%, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 30-49 tahun yang hanya mencapai 29,3%. Salah satu penyebabnya adalah tingginya jumlah pengguna kendaraan bermotor pada usia 17-29 tahun yang mencapai 37,74%, lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan kelompok usia 30-49 tahun yang hanya 34,04%. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya total kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa pada masa yang akan datang, Indonesia akan mengalami hambatan dalam pembangunan bangsa dibandingkan negara lainnya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Peralannya, generasi muda merupakan usia kerja produktif. Jika setiap harinya tetap terjadi lakalantas dan korbannya adalah generasi muda, maka jumlah generasi

muda produktif akan terus berkurang, sehingga secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi keberlangsungan pembangunan bangsa.

Berbagai penyebab lakalantas antara lain faktor kendaraan, kondisi jalan dan lingkungan, dan faktor perilaku pengemudi. Faktanya, lakalantas yang dialami generasi muda lebih banyak disebabkan faktor kelalaian dibandingkan faktor lainnya. Contohnya, perilaku tidak disiplin dalam berlalu lintas yang ditandai dengan mengabaikan rambu-rambu dan peraturan lalu lintas yang ada.

Praktik ketidaksiplinan mereka dalam berlalu lintas di jalan raya disebabkan beberapa faktor antara lain mental tidak sabar ingin sampai di tempat tujuan, tidak mau disaingi oleh pengendara lainnya atau menganggap dirinya adalah raja di jalan raya, ingin menjadi perhatian publik, merasa tidak ada pengawasan sehingga berperilaku sesuka hati, dan faktor lainnya.

Pemerintah melalui beberapa kementerian telah menggalakkan berbagai program yang menjadikan generasi muda sebagai duta keselamatan berlalu lintas. Bahkan, program ini telah berlangsung sejak 2007 hingga sekarang. Akan tetapi, praktik pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh generasi muda masih saja terjadi.

Apakah mereka dengan mudahnya memperoleh SIM sehingga yang dinilai belum layak pun ikut memilikinya? Tidak. Buktinya, pihak kepolisian sangat selektif dan ketat dalam menerbitkan SIM berkendara. Seseorang hanya dapat memiliki SIM jika berhasil melewati dan dinyatakan lulus di sejumlah rangkaian tes. Bahkan, beberapa tahun terakhir, syarat untuk mengajukan SIM semakin diperketat dengan menambahkan sejumlah tes seperti seorang calon pengendara harus lulus ujian psikologi.

Pemerintah dan unsur terkait terus melakukan program yang bertujuan untuk meminimalkan lakalantas yang disebabkan perilaku tidak patuh peraturan lalu lintas, salah satunya penerapan sistem tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di sejumlah daerah. Program ini dinilai mampu mengurangi tingkat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Akan tetapi, sistem e-tilang ini belum diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia dan masih menjangkau hanya beberapa ruas jalan di daerah tersebut.

Menurut penulis, pemberlakuan e-tilang saat ini harus didukung penuh oleh seluruh komponen bangsa agar dalam praktiknya sesuai yang diharapkan. Pemerintah dan pihak terkait harus hadir terdepan dalam menyediakan berbagai komponen pendukung seperti dukungan regulasi, pembiayaan agar program ini tetap berkelanjutan, dan penambahan sejumlah fasilitas dalam meningkatkan kenyamanan pengendara di jalan raya seperti penambahan dan pelebaran ruas jalan, penambahan dan peremajaan rambu lalu lintas serta fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, petugas di lapangan harus tetap didistribusikan secara proporsional untuk mengatur kelancaran lalu lintas terutama pada jam-jam tertentu dan memberikan tindakan berupa sanksi tilang atas pelanggaran yang dilakukan pengendara saat itu juga. Tidak ada kompromi, siapa pun yang melanggar harus ditindak tanpa ada pengecualian.

Lalu, bagaimana peran masyarakat dan generasi muda sebagai pengguna kendaraan bermotor di jalan raya? Hilangkan kebiasaan tidak sabar dan buru-buru di jalan raya dengan menyusun jadwal bepergian secara terencana, hilangkan ego yang menganggap diri adalah raja di jalan raya dengan menanamkan kesadaran dalam diri masing-masing bahwa semua pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berlalu lintas.

Selain itu, hilangkan mental ingin menjadi pusat perhatian publik dengan menghargai pengendara lain, dan tumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ingat, *safety riding and safety first*, anda dinantikan keluarga di rumah dalam keadaan aman dan selamat.

APAKAH KAMPUS MENGAJAR SALAH SATU SOLUSI MEMAJUKAN PENDIDIKAN INDONESIA?

Program Kampus Mengajar merupakan bagian dari Kampus Merdeka yang digalakkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang saat ini dipimpin oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Tahun 2021 menjadi tahun kedua pelaksanaan program Kampus Mengajar. Saat ini memasuki bulan kedua pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021, dan akan berakhir pada 22 Juni 2021.

Salah seorang penulis merupakan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam program Kampus Mengajar. Mahasiswa yang terlibat dalam program ini merupakan mahasiswa yang telah lulus seleksi sebelumnya. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dan mengembangkan dirinya melalui sejumlah aktivitas di sekolah tempat mereka ditugaskan. Setiap DPL ditugaskan membimbing beberapa orang mahasiswa peserta program Kampus Mengajar.



Gambar 12. Penerimaan mahasiswa peserta program Kampus Mengajar di sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Tidak jarang seorang DPL diberikan tugas membimbing peserta program Kampus Mengajar pada dua sekolah yang berbeda kabupaten/kota. Peserta yang terpilih lalu ditempatkan berdasarkan pertimbangan kedekatan jarak antara tempat tinggal mereka dengan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak mengalami kendala jarak dalam melaksanakan aktivitasnya, selain pertimbangan pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagai DPL, penulis tidak harus mendampingi mahasiswa yang ditugaskan di luar kota tempat tinggal DPL. Penulis diberikan kesempatan hanya mendampingi mahasiswa yang di Kota Samarinda untuk mengunjungi dinas pendidikan setempat dan di sekolah tempat penugasan mahasiswa.

Mahasiswa mulai bertugas di sekolah sejak 23 Maret 2021. Mereka sudah lebih dari sebulan menjalani rutinitas layaknya seorang guru sekolah. Mereka mengajar, menyiapkan bahan ajar, memberikan dan memeriksa tugas siswa, membantu dalam mengembangkan teknologi informasi di sekolah, dan banyak lagi tugas lainnya. Bahkan, mahasiswa

yang terlibat pada program Kampus Mengajar tahun ini diharapkan mampu berfungsi sebagai edukator Covid-19 di sekolah.

Lalu, bagaimana mereka mengajar di sekolah saat pandemi Covid-19? Mereka menyesuaikan kebijakan masing-masing sekolah tempatnya bertugas. Ada yang tatap muka langsung dengan siswa dan ada pula secara daring. Proses konsultasi antara mahasiswa dengan DPL semuanya dilaksanakan secara daring. Selain DPL, mahasiswa juga dibimbing dan didampingi seorang guru pamong yang ditugaskan oleh pihak sekolah.

Selama program ini berlangsung, penulis telah melakukan koordinasi beberapa kali dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi aktivitas mahasiswa di sekolah. Sehingga, hal-hal yang menjadi kendala saat program ini berlangsung akan dibahas secara bersama antara DPL dan pihak sekolah agar ditemukan solusi penyelesaiannya.

Mahasiswa dan DPL secara rutin melakukan sesi diskusi setiap minggunya. Tujuannya untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan seminggu terakhir, kegiatan yang akan dilakukan seminggu kemudian, dan membahas secara bersama pula solusi jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, DPL setiap harinya akan melakukan pemantauan kegiatan mahasiswa melalui aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Tentu dalam pelaksanaan program Kampus Mengajar ini ditemukan sejumlah kendala baik yang dialami mahasiswa dan DPL maupun pihak sekolah. Misalnya, keterbatasan tatap muka langsung antara mahasiswa dan siswa sehingga mahasiswa terbatas pula memahami kemampuan siswa secara langsung. Selain itu, mahasiswa juga terbatas untuk mengekspresikan segala kemampuannya dalam mentransfer ilmu pengetahuan.

DPL pun mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembimbingan kepada mahasiswa. Apalagi, jika saat pembimbingan dilakukan tidak didukung dengan jaringan internet yang memadai. Akses DPL ke akun Kampus Merdeka untuk melakukan monitoring kegiatan mahasiswa sehari-hari juga seringkali masih terkendala. Begitu pula hal yang sama dialami oleh pihak sekolah.

Oleh karena itu, beberapa catatan penting penulis agar ke depan jika program Kampus Mengajar ini masih dijalankan di masa pandemi antara lain penyempurnaan sistem teknologi informasi, perlunya keterlibatan langsung pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dalam mendukung tersedianya jaringan internet yang memadai di setiap sekolah.

Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah, tidak hanya berfungsi saat pembelajaran daring selama pandemi saja, akan tetapi semakin memudahkan semua komponen di sekolah termasuk guru, tenaga kependidikan, dan bahkan para siswa dalam mengakses informasi kekinian secara cepat tanpa hambatan jaringan internet yang pasang surut.

Program Kampus Mengajar ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia. Mahasiswa tidak hanya dibekali materi ilmu pengetahuan semata di ruang perkuliahan, akan tetapi melalui program ini mereka telah dipersiapkan sejak dini untuk siap bekerja di berbagai lapangan pekerjaan.

Penulis berharap bahwa program ini pada masa yang akan datang tidak hanya menugaskan mahasiswa di sekolah dasar saja, tetapi juga di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya dengan menghadirkan program Kampus Mengajar ini yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Maju terus pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dewi, Retia Kartika., 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu-psbb-aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?page=all>. Diakses 17 Maret 2021
2. Dinas Lingkungan Hidup, Samarinda. <http://dlh.samarindakota.go.id/regulasi/peraturan-walikota.html>. Diakses 20 Maret 2021
3. Dinas Lingkungan Hidup, Samarinda. <http://dlh.samarindakota.go.id/peraturan-walikota>. Diakses 20 Maret 2021
4. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2021. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>
5. Humas BNN RI, 2018. World Drug Report 2018: krisis opioid, penyalahgunaan narkoba meningkat; kokain dan opium mencatatkan rekor tinggi (UNODC). <https://bnn.go.id/world-drug-report-2018-krisis-opioid-penyalahgunaan-narkoba-meningkat-kokain-dan-opium-mencatatkan-rekor-tinggi-unodc/>. Diakses 12 Maret 2021
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. <https://Covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-23-april-2021>
7. Kementerian Kesehatan RI, 2021. <https://Covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-23-april-2021>
8. Komara, Kannia Nur Haida, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-011789907/sejarah-hari-kartini-diperingati-setiap-21-april-sang-pelopor-kebangkitan-perempuan-pribumi>
9. KPCPEN, 2021, Situasi virus COVID-19 di Indonesia. <https://Covid19.go.id/>, Diakses 12 Maret 2021
10. Maulida, Rani, 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>
11. Puslitdatin BNN RI, 2019. Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses 12 Maret 2021

12. Shalihah, Nur Fitriatus, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/19/081500465/hari-ini-dalam-sejarah--gayus-tambunan-divonis-7-tahun-penjara?page=all>
13. Sekretariat JDIH, 2021. <https://jdih.setkab.go.id>. Diakses 22 Maret 2021
14. Wicaksono, Adhi., 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326144816-20-622478/larangan-mudik-lebaran-berlaku-6-17-mei-2021>
15. Wikipedia, 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini>. Diakses 23 Maret 2021
16. Wikipedia, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekebalan_kelompok. Diakses 23 Maret 2021
17. WHO, 2021, Coronavirus Dashboard. <https://Covid19.who.int/>, Diakses 12 Maret 2021

BIODATA PENULIS



Dr. Sunardi, S.S., M. Hum.

Pria kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan, 6 Juni 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Hasanuddin, dan jenjang pendidikan S3 di Universitas Negeri Makassar tahun 2017 bidang ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Sejak tahun 2003 aktif menjadi dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan di FKIP Universitas Mulawarman.



Ilham Abu, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya 30 tahun yang lalu, 28 Desember 1991. Telah menyelesaikan pendidikan jenjang S1 tahun 2014 dan S2 tahun 2017 di Universitas Negeri Makassar bidang ilmu Pendidikan Ekonomi. Aktif bekerja sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman sejak tahun 2019 hingga saat ini di Program Studi Pendidikan Ekonomi.



Muhammad Sultan, SKM., M. Kes.

Lahir di Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, 14 Februari 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar tahun 2005 dan S2 di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2008 bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi bidang ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sejak tahun 2008 hingga saat ini aktif bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

Strategi Mengelola Dampak COVID-19 di Berbagai Sektor

Sejak kemunculan Covid-19 pada akhir tahun 2019 di dunia dan dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, akan tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya dan dunia pendidikan.

Pemerintah Indonesia bersama seluruh elemen bangsa telah melakukan berbagai pendekatan dalam mengendalikan Covid-19. Namun, hingga buku ini telah selesai disusun, Covid-19 masih tetap berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda kepastian kapan akan berhenti dan menghilang dari Indonesia.

Pada beberapa bagian dalam buku ini akan dibahas berbagai dampak yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19, mulai dari permasalahan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan pro-kontra program vaksinasi, peran tokoh masyarakat dan generasi milenial dalam pengendalian Covid-19, strategi pembelajaran di satuan pendidikan selama pandemi, pro-kontra mudik lebaran dan silaturahmi virtual, hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi Covid-19 jika berlangsung secara permanen.

Penulis juga mengulas berbagai permasalahan sosial lainnya yang seringkali terjadi dan ditemukan di lingkungan masyarakat baik sebelum, saat, maupun pasca pandemi Covid-19 seperti penanganan masalah sampah, peran perguruan tinggi dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, pengendalian kecelakaan lalu lintas pada remaja, manajemen usaha dan perbankan, dan solusi memajukan pendidikan di Indonesia.

Para pembaca akan mudah memahami isi buku ini karena setiap permasalahan yang dikaji, penulis menyajikannya dengan bahasa dan istilah umum yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Selain itu, penulis juga menyampaikan berbagai alternatif solusi secara operasional dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga membantu pembaca dalam menerapkan solusi tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia

ISBN 978-623-6384-36-7

